



● TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 ●

Info Indonesia

MINGGU III FEBRUARI 2024

HARGA, @Rp 20.000,-



PALOH-IMIN KE PRABOWO GAME OVER DEMOKRASI INDONESIA



Election
2024



▶ **UTUSAN
DAERAH SUMSEL
DIKUASAI
SRIKANDI**

▶ **MAWARDI
YAHYA VS
HERMAN
DERU**

▶ **HASIL
PEMILU BUKAN
ASPIRASI
RAKYAT**

▶ **TARGET
KEMENANGAN
PAN UNTUK DESY
RATNASARI**

▶ **DEMOKRAT
KUATKAN
POSISI
JOKOWI**

“Terbuka kemungkinan Nasdem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tidak hanya kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres masih ada ruang untuk ikut dengan pemenang”



Arifki Chaniago

Menguji Konsistensi

Bola panas hasil Pemilihan Presiden 2024 masih terus berlanjut, meski untuk sementara sudah diketahui siapa pemenangnya. Kemenangan pasangan 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dianggap tidak murni dan penuh kecurangan.

Berbagai upaya pengungkapan kecurangan terus dilakukan pasangan 01 dan 03 yang melihat banyak ketidaknetralan, terutama dari penyelenggara Pemilu dan pemerintah sendiri. Pemerintah kemudian merujuk ke tingkatan tertinggi dan siapa lagi bukan Joko Widodo sebagai Presiden RI.

Pemilu 2024 dianggap penuh kecurangan, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian memasukkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Kemudinan tuduhan ketidaknetralan Jokowi yang ditunjukkan dengan bagi-bagi bansos.

Situasi ini kemudian lebih meningkat lagi saat Prabowo-Gibran menang di Pilpres dan diperkirakan dengan satu putaran saja. Satu putaran ini menunjukkan pasangan 02 menang telak. Kemenangan besar ini juga diperkuat dengan hasil survei yang cenderung mengarah ke satu putaran.

Di sisi lain, pasangan 01 dan 03 tidak percaya dengan hasil survei tersebut. Mereka lebih percaya hasil survei internal yang lebih menguntungkan mereka, namun tidak percaya diri untuk diumumkan ke publik.

Sekarang bola panas itu berlanjut dengan adanya rencana pemakzulan dan penggunaan hak angket di DPR RI untuk mengungkap kecurangan Pilpres di parlemen. Wacana ini sempat didorong Ganjar Pranowo yang didukung penuh PDIP.

PDIP sendiri bisa tersenyum lebar meski kalah di Pilpres, namun mereka masih mampu menguasai parlemen dengan meraih persentase terbanyak dibanding partai lain.

Namun, usulan Hak Angket ini juga sepertinya sulit terwujud karena di waktu bersamaan, Joko Widodo juga melakukan manuver politik. Salah satunya mengundang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk berdialog.

Pertemuan ini menimbulkan multi tafsir, apalagi suara Nasdem di parlemen juga mengalami peningkatan. Mungkin saja, Nasdem akan ikut bergabung dengan Prabowo-Gibran nanti tentu dengan deal-deal politik yang sudah disepakati.

Bisa juga Nasdem menjaga konsistensi dalam berpolitik dengan terus mengusung semangat perubahan. Artinya mereka juga bisa saja bersikap oposisi meski energi yang dikeluarkan sangat besar.

Di sisi lain, banyak yang mengharapkan agar PDIP memilih jalur oposisi saja di Pemilu 2024 ini. Posisi oposisi bukanlah buruk namun malah membuat demokrasi semakin baik dan pengawasan lebih kuat serta ketat.

Posisi oposisi bahkan semakin kuat bila PKS, Nasdem, PDIP serta partai lain ikut bersatu. Namun sekali lagi untuk menjaga konsistensi itu butuh energi dan pengorbanan yang cukup besar.

Sekarang publik masih melihat ke mana arah politik ini akan dibawa para elit. Selamat membaca!!!



INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan **PEMIMPIN REDAKSI:** Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI:** Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani **REDAKTUR:** Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina **REPORTER:** Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali **KEUANGAN :** Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI:** Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI:** Abdul Mughtar
HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.
1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-
BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:** Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126 **TELP :** 0711-7442344



“Jadi kualitas dari hasil Pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat”

Anies Baswedan

HASIL PEMILU BUKAN ASPIRASI RAKYAT

Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, mengungkap permasalahan terbesar yang ditemukan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) sebelum pencoblosan Pilpres 2024.

Anies menyebut aktivitas yang bermasalah justru bukan saat di TPS Pemilu 2024. Namun menurut Anies, masalah terbesar terjadi sebelum pencoblosan itu mempengaruhi aspirasi masyarakat dalam memilih yang telah terbentuk sebelumnya.

“Dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada,” kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Anies enggan merinci aktivitas bermasalah sebelum pencoblosan yang dimaksud. Ia hanya menyebut aktivitas ini mengkhawatirkan. Terlebih, aktivitas ini menghasilkan Pemilu yang tak seluruhnya mencerminkan aspirasi masyarakat.

Anies bahkan menyebut sebagian aspirasi masyarakat yang tercatat dalam hasil Pemilu sejauh ini adalah aspirasi yang dipaksakan oleh pihak tertentu.

“Jadi kualitas dari hasil Pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat. Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat,” ujar dia.

Kendati demikian, Anies mengaku tak ingin gegabah dengan mendeklarasikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024.

“Kami tidak mau gegabah. Karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi,” tutur dia.

Anies mengungkapkan pihaknya masih terus mengumpulkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dugaan kecurangan pemilu. Saat ini, menurutnya, temuan dugaan kecurangan yang pihaknya temukan adalah yang dilakukan Pra-TPS.

“Kami bersyukur tim hukum sampai dengan daerah komplit di seluruh provinsi mengumpulkan semua data dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekadar menimbulkan kontroversi,” jelasnya.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengungkapkan tim hukum AMIN bersiap untuk mengambil langkah yang diperlukan mengenai proses yang sedang Pemilu.

“Insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya di mana THN akan menyiapkan langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan AMIN adalah pasangan yang memiliki kesiapan masuk di putaran kedua,” ungkap Imin.

Di sisi lain, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menanggapi ajakan capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, untuk mengajukan hak angket atau interpelasi di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Anies menyebut tiga partai yang tergabung di Koalisi Perubahan yakni PKS, PKB, dan NasDem siap untuk jadi bagian dan memuluskan inisiasi tersebut di DPR.

“Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” kata Anies.

Anies mengaku kubunya telah menyiapkan data-data yang diperlukan untuk mengajukan hak angket tersebut. Ia menyebut proses pengajuan hak angket dapat berjalan di DPR di bawah kepemimpinan PDIP sebagai partai dengan kursi terbesar.

Anies menilai inisiasi yang digulirkan oleh kubu Ganjar-Mahfud ini adalah suatu hal yang baik.

“Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan,” jelas dia.

Sebelumnya, Ganjar mengajak Koalisi Perubahan menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mendalami dugaan kecurangan di Pil-

pres 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin, 19 Februari 2024.

Ganjar menyebut hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ia menduga kecurangan terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Adapun partai pendukung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis, 15 Februari 2024. Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka

fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ungkap Ganjar.

Anies juga merespons pernyataan Prabowo Subianto yang akan merangkul semua pihak setelah Pilpres 2024. Anies menanggapi dengan pernyataan menohok, bahwa proses penghitungan suara belum belum selesai.

“Penghitungan (suara) saja belum selesai,” kata Anies.

Anies mengatakan semua tahapan Pilpres 2024 harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, Prabowo baru bisa bilang akan merangkul semua pihak.

Selain itu, Anies juga mengklaim partai di dalam Koalisi Perubahan masih tetap solid. Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, gak ada yang berubah. Anies-Muhaimin jalan terus bersama,” ujar Anies, Selasa, 20 Februari 2024.

Anies menegaskan bahwa selama ini pihaknya masih terus bekerja secara intensif untuk membuktikan kecurangan kecurangan yang masif dilakukan dalam Pilpres 2024.

“Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus,” ungkapnya.

“Lalu partai koalisi, partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama,” tandas Anies.

Di sisi lain, hingga Rabu, 21 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, sebanyak 73,50 persen data Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tertampung masuk dan suara Prabowo-Gibran semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lain.

Prabowo-Gibran tercatat mengumpulkan 58.943.436 suara atau 58,77 persen. Anies-Cak Imin sebanyak 24.310.545 atau 24,24 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 17.045.031 suara atau 16,99 persen.

•RDO



“Saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam media sosial siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif”



Ahmad Muzani

KABINET PRABOWO-GIBRAN BOCOR DULUAN

Beredar di media sosial, sebuah poster dengan judul “Bocoran Daftar Menteri Prabowo-Gibran” dengan kabinet bernama Kabinet Indonesia Emas. Poster bernuansa biru langit itu menyebut Prabowo-Gibran akan mengadopsi jabatan menteri muda ala Sukarno untuk memastikan keterwakilan anak muda dalam pemerintahan.

Di antara nama-nama yang muncul dalam daftar itu adalah Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Nusron Wahid sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Rosan Roeslani sebagai Menteri Luar Negeri, Grace Natalie sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan, Perempuan, dan Anak, hingga Budi Man Sudjatmiko sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi.

Lalu, terlihat Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafriz Sjafoeddin Menteri Pertahanan. Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, mengatakan beredarnya informasi susunan kabinet pemerintahan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu hanya bersifat spekulatif. Menurut dia, Prabowo dan Gibran masih menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya ingin mengatakan bahwa semua yang beredar di berbagai macam media sosial siapapun namanya, apapun daftarnya, itu spekulatif,” kata Muzani di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menilai hanya KPU lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan calon presiden dan wakil presiden untuk menjadi pemenang pemilu. “Setelah itu saya kira Pak Prabowo baru akan memikirkan yang lain,” ujar Muzani.

Muzani mengaku Prabowo telah mulai membicarakan permasalahan pelaksanaan program dengan tokoh-tokoh koalisi. Namun, dia memastikan pembicaraan itu belum menyentuh perihal susunan kabinet. “Saya harus pastikan itu adalah spekulatif,” ujar Muzani.

belum membicarakan itu.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyebut beredarnya poster bocoran daftar Kabinet Menteri Prabowo-Gibran sebagai aspirasi rakyat. Dalam poster daftar menteri Prabowo-Gibran yang beredar tersebut,

er bocoran daftar menteri Prabowo-Gibran sebagai hoaks, melainkan ia menyebutnya sebagai aspirasi.

“Engga hoaks, aspirasi. Ya itu kan sama aja kan bukan hoaks itu kan baru calon, dan orang bersuara saya juga gatau siapa yang bersuara. Tapi buat kami tunggu saja orang masih real count belum 100 persen,” ujarnya.

Namun yang pasti, lebih baik masyarakat menunggu hasil resmi pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU. Menurutnya, jika sudah diumumkan, maka pihak yang terpilih pun akan segera mempersiapkan daftar menteri-menterinya.

“Belum, kita tunggu real count dari KPU kan real count suara nyata sekarang sudah 75 persen, ya sudah tunggu saja kalau sudah di putusin sama KPU kita menang dan segala macam baru kita pikirin, tunggulah,” ujarnya.

Wakil Komandan TKN Fanta (Pemilih Muda) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati, menyatakan semua bocoran mengenai susunan kabinet menteri Prabowo-Gibran adalah hoaks. Bocoran-bocoran yang beredar biasanya hanya berdasarkan asumsi.

“Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoaks. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang,” ujar Sara, Selasa, 20 Februari 2024.

Sara yang namanya turut masuk bocoran susunan kabinet itu mengakui prediksinya bisa salah dan bisa benar. Namun, berdasarkan pengalaman yang ada, prediksi susunan kabinet pemerintahan selalu salah. Lagi pula, kata keponakan Prabowo tersebut, hasil resmi dari KPU terkait Pilpres 2024 masih belum keluar.

“Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dululah langkah demi langkah,” jelasnya.

Sara mengingatkan, kubu Prabowo-Gibran terbuka terhadap siapa pun. Adapun Prabowo memang menegaskan akan merangkul rival-rivalnya. “Jangan lupa kita masih terbuka kepada siapa pun yang mau bergabung di pemerintahan ke depan. Pak Prabowo sudah tegaskan itu,” imbuh Sara.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyatakan sumber poster tersebut tidak jelas. Pihaknya tidak pernah mengeluarkan poster itu atau menyampaikan informasi mengenai rencana susunan kabinet.

“Namanya juga sosmed. Berita dari sumber yang tidak jelas,” katanya, Selasa, 20 Februari 2024.

Nusron juga mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan mengenai susunan menteri apabila Prabowo-Gibran resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Sejalan ini, perolehan suara Prabowo-Gibran unggul dibandingkan dua calon lain, tapi penghitungan oleh KPU belum final.

Selain itu, Nusron menegaskan bahwa pemilihan susunan menteri nantinya akan menjadi hak prerogatif presiden. “Nggak ada pembahasan soal menteri. Itu hak prerogatif presiden,” tegasnya. ●RDO

BOCORAN DAFTAR MENTERI PRABOWO-GIBRAN

KABINET INDONESIA EMAS

Prabowo-Gibran akan menganut struktur kabinet Ir. Soekarno yang menyertakan posisi Menteri Muda. Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di dalam pemerintahan secara substantif.

Dewan Pertimbangan Presiden

Ketua

Ir. JOKO WIDODO

Wakil

Dr. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Jajaran Menteri dan Kepala Staf

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Kepala Staf Kepresidenan Nusron Wahid | Menko Bidang Perekonomian Dr. (HC) Airlangga Hartarto | Menko Bidang Pangan, Gizi & Pembangunan Manusia Prof. Rachmat Pambudy | Menko Bidang Energi, Investasi & Lingkungan Hidup Dr. (HC) Erick Thohir | Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Agus Harimurti Yudhoyono |
| Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafriz Sjafoeddin | Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herrindra | Menteri Sekretaris Negara Sugiono | Menteri Sekretaris Kabinet Mayjen TNI. Rui Duarte | Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian |
| Menteri Luar Negeri Rosan Roeslani | Wakil Menteri Luar Negeri Teuku Riefki Harysa | Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Helmi Yahya | Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yusril Ihza Mahendra |
| Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Ace Hasan Syadzily | Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Dr. Terawan | Wakil Menteri Kesehatan dan Badan Gizi Dr. Benny Octavianus | Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Rahayu Saraswati | Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak Grace Natalie |
| Menteri Riset & Kepala BRIN Letjen TNI (Purn.) Amarulla Octavian | Menteri Ketenagakerjaan Emanuel Melkiades Laka Lena | Menteri Perindustrian Dr. Budi Gunadi Sadikin | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ir. Rauf Purnama | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Ridwan Kamil |
| Menteri Perhubungan Bambang Haryo Soekartono | Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas Wishnu Wardhana | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Okki Muraza | Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman | Menteri Lingkungan Hidup Budiatrisio Djwandono |
| Menteri Desa & Transmigrasi Kartiko Wirjoatmodjo | Menteri Investasi Bahil Lahadalia | Menteri Komunikasi, Informatika & Digital Budi Arie Setiadi | Menteri Muda Komunikasi, Informatika & Digital Noudhy Valdryno | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Mayjen TNI (Purn.) Bambang Eko S. |
| Menteri Pertambangan dan Energi Jenderal TNI Hadi Tjahjanto | Wakil Menteri Pertambangan dan Energi Raja Juli Antoni | Menteri BUMN Ir. Sakti Wahyu Trenggono | Wakil Menteri BUMN Dirgayuza Setiawan | Menteri Kelautan dan Perikanan TB Haeru Rahayu |
| Menteri Kelautan dan Perikanan M. Riza Damanik | Menteri Muda Kelautan dan Perikanan Dito Ariotedjo | Menteri Koperasi, UKM & Pasar Tradisional Maruarir Sirait | Wakil Menteri Koperasi, UKM & Pasar Tradisional Sudaryono | Menteri Sekretaris Pengendalian Pembangunan Roberto P. Lumban Gaol |
| Kepala BIN Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman | Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi | Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana | Kepala Badan Perencanaan dan Informasi Sekretariat Presiden Prof. Bambang Brodjonegoro | Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Angga Raka Prabowo |

Dia juga mengatakan jabatan menteri muda yang disebut-sebut dalam poster itu bersifat spekulatif. Dia mengaku Prabowo

Budi Arie Setiadi tetap menjabat sebagai Menteri Komunikasi, Informatika dan Digital. Disisi lain, Budi juga tidak menyebut post-

“Mending tim paslon 03 melakukan persiapan bukti serius untuk ditunjukkan di MK nanti ketimbang terjebak dalam permainan politik DPR melalui hak angket ini”

Lucius Karus

GANJAR DORONG HAK ANGKET PARTAI PENDUKUNG TAKUT

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap banyak kejanggalan. Dia mendorong parlemen untuk memanggil penyelenggara pemilu untuk diklarifikasi atas pelaksanaan pemilu.

Menurut Ganjar, salah satu hal yang perlu diklarifikasi yakni adanya temuan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melebihi batas dari 300 orang pada Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baginya, temuan itu menjadi anomali pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Minimum sebenarnya Komisi II memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara pemilu, undang masyarakat,” kata Ganjar dalam keterangan resminya, Rabu, 21 Februari 2024.

Dengan demikian, kata Ganjar, seluruh pihak bisa menyampaikan klarifikasi dan pandangannya terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. “Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” ucap Ganjar.

Ganjar merasa ada anomali dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Anomali pelaksanaan pemilu itu disimpulkan setelah dirinya bersama partai politik pendukung melakukan evaluasi pasca pemungutan suara. “Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya,” tutur Ganjar.

Diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi beberapa kejanggalan, terutama proses rekapitulasi KPU melalui Sirekap. Selain itu, munculnya dugaan kecurangan-kecurangan

dalam penghitungan kertas hasil suara di banyak TPS.

Ganjar pun menaruh harapan supaya usulan hak angket kecurangan pemilu 2024 di DPR bisa benar-benar terjadi.

“Ya mudah-mudahan sih bisa terjadi (hak angket). Saya sih mendorong minimal Raker (rapat kerja) deh biar bisa tahu,” kata Ganjar.

Ganjar mengakui belum ada ‘lampu hijau’ secara formal di antara parpol koalisinya terkait hak angket tersebut. Ia baru mengamati pernyataan-pernyataan dari para petinggi parpol belakangan ini.

Baginya, hak angket sangat baik untuk melihat, menyelidiki, membuktikan lebih jauh soal kecurangan pemilu. Karenanya, ia mengusulkan rencana tersebut di samping hak interpelasi. Meski begitu, ia mengakui jika hak angket pasti memiliki proses politik yang tak mudah.

“Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan tapi pasti proses politiknya tidak gampang. Maka saya bilang udahlah paling kecil aja, Raker,” kata Ganjar.

“Kalau Raker itu bisa dilakukan dalam waktu segera, maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral, maka masyarakat bisa tahu apa yang terjadi,” tambahnya.

Meski begitu, ternyata partai-partai pengusung Ganjar maupun Anies Baswedan memberikan komentar yang berbeda. Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 bisa dilakukan. Namun, NasDem menunggu arahan Surya Paloh.

“Bisa saja hak angket dilakukan. Tapi, kalau untuk NasDem, kita tunggu arahan Ketua Umum (Surya Paloh),” kata Sahroni.

Sahroni menyebut pihaknya tidak menunggu arahan Anies Baswedan. Menuutnya, Surya Paloh-lah yang akan memberi arahan.

“Bagaimana arah selanjutnya, kami kader siap mengikuti perintah dari ketua umum, kita nunggu arahan Pak Surya Paloh selaku ketua umum,” ujarnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Surya Paloh. “Sejauh ini belum ada arahan,” imbuhnya.

PKS pun mengungkit kesibukan partai saat ini usai pencoblosan. PKS menganggap hak angket dugaan kecurangan pemilu tak bisa dalam waktu dekat.

“Usulan Mas Ganjar dan Mas Anies bagus. Tapi sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Parpol sedang konsentrasi pengawalan suara di legislatif,” kata juru bicara PKS, Ahmad Mabruhi.

Mabruhi menjelaskan partainya terus berkomunikasi dengan PKB dan NasDem yang tergabung dalam koalisi pendukung Anies-Muhaimin Iskandar. Ketiga partai ini memiliki kursi di DPR saat ini.

Namun, Mabruhi tak menjelaskan lebih jauh perkiraan kapan akan ada waktu hak angket dugaan kecurangan pilpres. Mabruhi juga tak banyak bicara soal apakah PKS optimis dengan komposisi DPR saat ini dengan wacana hak angket.

Kemudian, PPP yang mendukung Ganjar justru mengaku masih mengkaji wacana hak angket dugaan kecurangan pilpres. “Kita pelajari dulu ya, lagi kumpulkan data-data untuk mempelajari isu-isu politik terkini, termasuk dorongan hak angket,” kata

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi.

Awiek mengatakan PPP masih fokus dengan penghitungan suara Pemilu 2024. Terkait wacana hak angket dugaan kecurangan pilpres, PPP akan melihat kondisi saat masa sidang DPR.

“Tentu ketika angket, sekarang kan masih masa reses, tentu kita akan lihat pada masa sidang yang akan datang. Masih kita kaji dulu ya (hak angket). Saat ini karena masih fokus untuk rekapitulasi suara,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyatakan sulit bagi DPR untuk mengubah hasil Pemilu melalui penggunaan hak angket. Sebab, butuh proses lama dalam mengusulkan hak angket. Ditambah dinamika pada proses persidangan nantinya.

“Jadi kalau inisiator angket yakni tim paslon 03 berharap akan mendapatkan bantuan cepat dari penggunaan hak angket, misalnya untuk merubah hasil Pemilu, ya saya kira ini mimpi sih,” ungkap Lucius, Rabu, 21 Februari 2024.

Dia menuturkan hak angket kecurangan Pemilu mungkin penting dalam konteks jangka menengah atau panjang.

“Mending tim paslon 03 melakukan persiapan bukti serius untuk ditunjukkan di MK nanti ketimbang terjebak dalam permainan politik DPR melalui hak angket ini,” ujarnya.

Lucius menyebut jika ditemukan ada praktik kecurangan, DPR bisa mengeluarkan rekomendasi untuk perubahan aturan dan kebijakan ke depannya.

“Jadi sifatnya bukan untuk mencari sekaligus menghukum pelaku kecurangan yang diduga ada di Pemilu 2024 ini tetapi untuk perbaikan sistem ke depan,” ucapnya.

Dia berpendapat kalau untuk solusi jangka menengah dan panjang, penggunaan hak angket tidak terlalu mendesak. Sebaliknya, hal itu bisa dilakukan evaluasi mendalam pada rapat kerja Komisi II DPR dan KPU-Bawaslu.

Di sisi lain, dia menegaskan dalam proses persiapan Pemilu 2024, tak ada aturan penyelenggaraan Pemilu yang diketok KPU tanpa persetujuan Komisi II DPR. Lucius menerangkan semua perkembangan tahapan penyelenggaraan dilaporkan dan dibahas DPR.

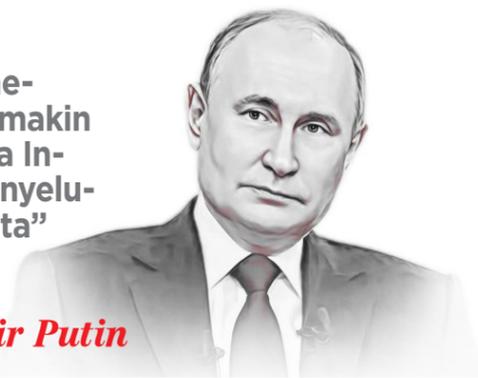
“Kalau harus menyelidiki kecurangan sejak awal proses tahapan pemilu, ya itu artinya juga menyelidiki Komisi II DPR itu. Bagaimana bisa? DPR menyelidiki DPR sendiri? Yang ada DPR melindungi DPR,” ungkapnya.

Dia menjelaskan anggota DPR juga menjadi peserta Pemilu sebagai calon anggota legislatif, di mana aktif sebagai tim pemenangan capres-cawapres.

“Kalau mau menyelidiki kecurangan, sangat mungkin pihak yang harus diselidiki itu adalah anggota DPR atau parpol asal anggota DPR. Bagaimana bisa itu dilakukan?” tegas Lucius. ●RDO



“Saya yakin sebagai kepala negara, Anda akan berperan semakin memajukan kerja sama antara Indonesia dan Rusia secara menyeluruh untuk kebaikan negara kita”



Vladimir Putin

13 PEMIMPIN NEGARA AKUI KEMENANGAN PRABOWO

Sebanyak 13 pemimpin negara sudah menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto atas kemenangannya dalam Pilpres 2024 per 21 Februari 2024. Prabowo diketahui merupakan capres pemenang Pilpres 2024 berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) dan real count sementara KPU.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, adalah salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Prabowo. Melalui akun X, Albanese mengucapkan selamat kepada Prabowo karena menjadi calon presiden terpilih Indonesia versi hitung cepat.

“Saya merasa terhormat menjadi pemimpin asing pertama yang hari ini berbicara dengan Prabowo yang memiliki keunggulan jelas dalam hal resmi dan tidak resmi, mengenai ambisi saya untuk masa depan hubungan Australia-Indonesia,” tulis Albanese, Kamis, 15 Februari 2024.

Pemerintah Presiden China, Xi Jinping, melalui Duta Besar China untuk RI, Lu Kang, juga memberi selamat ke Prabowo. Dalam instagram resmi Prabowo, terlihat Dubes Lu sedang berdiskusi dengan Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

“Terima kasih Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok H.E. Lu Kang @chinaembassy_indonesia atas ucapan selamat dan kunjungannya kepada saya di Rumah Kertanegara, Jakarta,” tulis Prabowo di akun instagramnya @prabowo.

Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan pemerintahnya siap bekerja dengan pemimpin baru Indonesia yang terpilih melalui Pemilu 2024 untuk mewujudkan kerja sama yang semakin menguntungkan.

Ia juga mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas pemilihan umum yang berjalan dengan baik dan lancar pada 14 Februari lalu. “Kami siap bekerja dengan siapa pun yang dipilih rakyat Indonesia sebagai pemimpin yang akan memajukan hubungan bilateral di antara negara kita,” ucap Vorobieva dalam pernyataan me-

dia di kediamannya di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa pemerintah Rusia menghargai pilihan rakyat Indonesia dalam pemilu. Vorobieva juga menyoroti ucapan selamat yang sebelumnya disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Prabowo Subianto yang unggul dalam penghitungan suara yang masih berlangsung.

“Dalam pernyataan selamatnya, Presiden Putin juga menyampaikan harapannya bahwa hubungan bilateral kita akan jadi semakin kuat,” ucapnya.

Putin pada 16 Februari 2024 menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan bahwa hubungan antara Rusia dan Indonesia selama ini didasari oleh tradisi baik persahabatan dan saling menghargai, serta terus berkembang pesat di banyak bidang.

“Saya yakin sebagai kepala negara, Anda akan berperan semakin memajukan kerja sama antara Indonesia dan Rusia secara menyeluruh untuk kebaikan negara kita,” ucap Putin dalam ucapan selamat kepada Prabowo, menurut pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Rusia pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Putin berharap semakin eratnya kerja sama Rusia-Indonesia akan men-

guatkan keamanan dan kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Dia juga berharap dapat menjalin dialog membangun bersama Prabowo serta mengembangkan kerja sama yang bermanfaat dalam isu-isu terkini terkait hubungan bilateral maupun isu internasional.

Presiden Filipina, Bongbong Marcos, juga mengirimkan ucapan selamat atas keunggulan Prabowo Subianto pada quick count semua lembaga survei dan real count KPU atas hasil Pilpres 2024. Bongbong meyakini, hubungan Filipina dan Indonesia semakin erat di bawah pemerintahan Prabowo nantinya.

“Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertahanan @prabowo atas kepemimpinannya dalam penghitungan suara terakhir untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral PH dengan Indonesia, tetangga dekat dan mitra di ASEAN, terutama saat kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini,” ucapnya melalui akun X @bongbongmarcos dikutip, Rabu, 21 Februari 2024.

Prabowo pun senang dengan ucapan yang diberikan Bongbong. Dia ingin nantinya pemerintah Indonesia bisa terus menja-

lin hubungan baik dengan Filipina.

“Saya berterima kasih dan merasa terhormat atas ucapan Anda. Merupakan suatu keistimewaan bisa mengabdikan kepada masyarakat Indonesia. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda dan melanjutkan persahabatan kuat yang terjalin selama 75 tahun terakhir antara Indonesia dan Filipina,” ujar Prabowo membalas melalui akun X @prabowo.

Prabowo juga sudah mendapatkan ucapan selamat dari Perdana Menteri India, Narendra Modi. Dia berharap, nantinya dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru di bawah Prabowo.

“Selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilihan presiden dan @prabowo yang memimpin. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Kepresidenan baru untuk lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara India dan Indonesia,” ucapnya lewat akun X @narendramodi.

Prabowo pun berterima kasih atas pesan yang dikirim PM Narendra Modi atas hasil Pemilu 2024. “Saya memiliki sentimen yang sama dengan Anda untuk lebih memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan India ke tingkat yang lebih tinggi. Saya berharap dapat bekerja lebih dekat dengan Anda,” ucap Prabowo.

Lalu, ucapan selamat juga datang dari Presiden Uni Emirat Arab Mohamed Bin Zayed. “Menerima telepon berupa ucapan selamat atas hasil sementara pemilu dari Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulai Mohamed Bin Zayed. Alhamdulillah ini merupakan sebuah cerminan baik dari hubungan persahabatan panjang antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang terjalin erat sampai hari ini,” ucap Prabowo melalui akun instagram dikutip, Rabu, 21 Februari 2024.

Selain enam kepala negara tersebut, pemimpin dunia yang sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yakni Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, PM Albania Edi Rama, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Presiden Nikaragua Daniel Ortega, dan PM Inggris Rishi Sunak.

•RDO





“Perlu diingat juga bahwa Muhaimin (Ketua Umum PKB) adalah orang yang rasional dan pragmatis demi kepentingan partainya. Ia enggan di luar pemerintah seperti PDIP dan Anies”

Efriza

CAK IMIN NUNGGU DIUNDANG JOKOWI

Presiden Joko Widodo menyatakan bakal mengundang semua elite partai politik usai sebelumnya bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta, 18 Februari 2024, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP.

“Semua, semua (akan diundang bertemu),” kata Presiden Joko Widodo di usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024

Sebelumnya, berkaitan dengan pertemuannya dengan Surya Paloh beberapa hari lalu, Jokowi menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi ‘jembatan’ bagi partai-partai.

“Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi ‘jembatan’, yang paling penting kan nanti partai-partai lah,” ujar Jokowi usai peresmian RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Jenderal Soedirman dan 20 rumah sakit TNI, di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan belum mendapat undangan bertemu Presiden Jokowi setelah Pilpres 2024. “Belum, belum (diundang),” kata Ketua Umum PKB itu di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Menurut Cak Imin, hingga saat ini belum ada ajakan bertemu dari Jokowi meski sebelumnya Kepala Negara menyatakan siap jadi jembatan semua pihak. “Ya undangannya mana?” ucap Muhaimin.

Adapun, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh menjadi pembicaraan publik karena mereka terafiliasi dengan kubu yang berbeda dalam Pilpres 2024. Putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Beberapa pihak pun menganggap pertemuan itu sebagai usaha Jokowi mengajak Surya Paloh bergabung dengan kubu Prabowo.

Meski begitu, Cak Imin berkata akan terus memperjuangkan perubahan sebagai gagasan yang dia usung bersama Anies di Pilpres 2024. “Saya terus di jalan perubahan,” kata Cak Imin menjawab pertanyaan dari awak media karena tidak menyebut akan berada di jalur perubahan saat malam pasca pencoblosan di rumah pemenangan AMIN Jalan Diponegoro Nomor 10.

“Mas Anies bilang kami kok. Kami tuh berdua,” kata Cak Imin.

“Saya (meragakan pernyataan Anies),” sanggah wartawan.

“Oh saya ya. Ya sudah kami di jalan perubahan,” jawab Cak Imin kembali.

Melihat hal tersebut, pasangan dari Cak Imin yaitu Anies Baswedan meminta Ketua Umum PKB ini untuk mengulang perkataan dirinya pada 14 Februari lalu.

“Gus ulangin, saya terus kami. Saya terus di jalan perubahan,” pinta Anies.

“Saya terus di jalan perubahan,” ujar Cak Imin. “Kami terus di jalan perubahan,” Anies dan Cak Imin berbicara bersama.

Sebelumnya, Anies Baswedan memastikan bahwa dirinya masih berada di jalur perubahan. Meski nantinya kalah dalam kontestasi lima tahunan negeri ini, Anies akan tidak akan bergeser dan masih dalam gerbong perubahan.

“Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di bawah gerakan perubahan.”

han ini dan tidak akan bergeser sedikit-pun,” kata Anies di Rumah Pemenangan di Jalan Diponegoro No. 10, Rabu, 14 Februari 2024.

Anies mengajak para relawan, pendukung, dan simpatisan dirinya untuk terus berjuang. Apalagi saat ini perjuangan belum usai karena proses perhitungan suara masih terus berjalan. Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa perjuangan masih sangat panjang dan tidak berenti di kampanye saja.

“Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini,” ujarnya.

Di sisi lain, politikus PKB, Cucun Ahmad Sjamsurijal, sebelumnya mengatakan, partainya terbuka untuk komunikasi politik dari semua pihak usai Pemilu 2024.

“Kalau misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan komunikasi politik itu para elite politik, ya sah-sah saja dilakukan,” kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu, 18 Februari 2024.

Direktur Pileg DPP PKB itu mengatakan, pihaknya juga menghargai upaya komunikasi politik dan menyebut hal tersebut adalah upaya dari para elite politik untuk membangun bangsa.

“Ya kita apresiasi itu sebagai suatu wujud bagaimana membangun negara ini seperti dilakukan oleh elite-elite politik,” ujar dia.

Ketua Fraksi PKB di DPR itu juga mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai Pemilu 2024.

“Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun,” katanya.

Gabung Koalisi Prabowo

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, meyakini, Prabowo Subianto sebagai capres pemenang berdasarkan hasil quick count, akan mengajak sejumlah partai kubu lawan untuk masuk koalisinya.

Prabowo perlu melakukan itu agar mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, sehingga pemerintahannya kelak bisa berjalan mulus.

“(Prabowo-Gibran) perlu membangun kekuatan koalisi yang besar jika ingin keputusan atau kebijakan pemerintahannya tidak diganggu oleh parlemen,” kata Efriza, Kamis, 15 Februari 2024.

Berdasarkan hasil quick count yang dilakukan Indikator Politik Indonesia dengan data masuk 95,43 persen, koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang masuk parlemen adalah Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Keempat partai tersebut total mendapatkan 42,85 persen suara dalam Pileg DPR.

Adapun koalisi partai pendukung Anies-Muhaimin, yakni Nasdem, PKB, dan PKS, total mendapatkan 28,07 persen suara. Sementara itu, koalisi partai pendukung Ganjar-Mahfud, yakni PDIP dan PPP, mendapatkan 20,42 persen suara.

Jika hasil quick count itu sejalan dengan hasil penghitungan resmi KPU, maka kemungkinan total kursi yang dimiliki koalisi Prabowo di Senayan tak mencapai 50 persen. Menurut Efriza, Prabowo Subianto selaku pemimpin KIM akan mengajak tiga partai politik untuk gabung koalisinya demi memastikan kelancaran pemerintahannya kelak. Tiga partai itu adalah Nasdem, PKB, dan PPP.

Efriza menjelaskan, Nasdem paling berpeluang besar gabung koalisi Prabowo. Sebab, Nasdem hingga saat ini masih loyal mendukung Pemerintahan Jokowi.

PKB, lanjut dia, juga berpotensi besar bisa gabung koalisi Prabowo. Sebab, PKB dan Gerindra pernah membangun koalisi jelang Pilpres 2024, meski gagal berlayar. Kendati begitu, hubungan Gerindra dan PKB tetap harmonis.

“Perlu diingat juga bahwa Muhaimin (Ketua Umum PKB) adalah orang yang rasional dan pragmatis demi kepentingan partainya. Ia enggan di luar pemerintah seperti PDIP dan Anies,” kata dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu.

Efriza menambahkan, PPP juga potensial gabung KIM jika berhasil masuk parlemen. Pasalnya, PPP diyakini ingin berada dalam pemerintahan sehingga punya sumber daya untuk membenahi internal partai. Selain itu, elite PPP punya hubungan baik dengan Jokowi dan Prabowo.

“PPP akan lebih memilih merapat ke pemerintah, malah yang akan ‘genit’ melempar sinyal agar diajak bergabung dengan pemerintahan,” ujarnya.

Efriza menjelaskan, apabila Prabowo berhasil merangkul tiga partai tersebut, maka tersisa dua partai yang akan menjadi oposisi di parlemen. Keduanya adalah PDIP dan PKS. ●RDO



“Memperjuangkan demokrasi dan keadilan tanpa kenal lelah adalah beyond election yang tak dibatasi oleh pemilu yang periodik”

Mahfud MD



PERJUANGKAN DEMOKRASI TAK DIBATASI POLITIK

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, menyatakan memperjuangkan demokrasi akan terus dilakukan tanpa dibatasi oleh pemilihan umum (Pemilu) yang digelar berkala setiap 5 tahun. Pernyataan itu disampaikan Mahfud melalui akun X-nya, @mohmahfudmd, pada Jumat, 16 Februari 2024.

“**M**emperjuangkan demokrasi dan keadilan tanpa kenal lelah adalah beyond election yang tak dibatasi oleh pemilu yang periodik,” tulis Mahfud.

Mahfud menyampaikan bahwa Pemilu sudah usai dan kini semua pihak tinggal menunggu hasil akhir yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam unggahan itu, Mahfud juga mengajak semua kalangan buat terus mencintai Indonesia. “Kita tak boleh lelah mencintai Indonesia. Perjuangan membangun demokrasi dan keadilan harus kita lanjutkan,” kata Mahfud.

Usai pernyataannya itu, Mahfud MD mengaku heran karena apa yang disampaikan dengan menyebut Pilpres 2024 sudah selesai dianggap ungkapan kekalahan. Meskipun kalah dalam hitung cepat atau quick count lembaga survei, Mahfud menegaskan, masih menunggu hitung resmi dari KPU.

“Saya tidak pernah nyatakan terima hasil pemilu,” kata Mahfud.

“(Kabar yang beredar) seakan bertendensi mempertentangkan Mas Ganjar dengan saya, ingin mengesankan Ganjar tak menerima hasil Pemilu sedang saya menerima,” kata Mahfud, Minggu, 18 Februari 2024.

Mahfud menegaskan, belum pernah menyatakan menerima hasil pemilu. Dirinya hanya menyebut, tahap pencoblosan pada Pemilu 2024 telah selesai.

“Makanya statement saya bersambung, ‘kita tinggal menunggu hasil akhirnya’. Tahapan pemilu belum berakhir,” ungkap mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Kemudian, ia menyebutkan akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Selanjutnya secara implisit melakukan langkah politik dan langkah hukum. “Jadi tak ada perbedaan substansi antara statement saya dan Mas Ganjar,” tegas Mahfud.

Dia menuturkan, Pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi

masih jauh dari kata selesai.

“Jadi, pemilu (sebagai pemungutan suara atau coblosan) sudah selesai pada tanggal 14/2/2024. Tetapi ‘tahapan’ pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai. Langkah hukum tetap disiapkan, langkah politik juga direncanakan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo juga menepis kabar hubungannya dengan Mahfud retak. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memastikan hubungannya dengan Mahfud baik-baik saja. Bahkan, Ganjar mengaku beberapa hari lalu mengikuti rapat bersama Mahfud.

Batalkan Hasil Pemilu

Mahfud MD juga berbicara terkait kecurangan dalam pemilu. Dia menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu.

Awalnya Mahfud tak menampik pernah mengatakan pihak yang kalah dalam pemilu akan menuduh pihak yang menang melakukan kecurangan.

“Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy’ari dibentuk. Datang ke tempat saya, saya diberi tahu bahwa ‘ a w a s n a n -

ti ada gugatan bahwa pemilu ini curang’. Begitu juga saya pidato secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023,” kata Mahfud di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Februari 2024.

Mahfud mengatakan sudah menyampaikan hal itu sebelum tahapan pemilu dimulai pada awal 2023. Namun, dia mengatakan hal itu tak boleh diartikan jika penggugat selalu kalah.

“Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang itu sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan,” ujarnya.

Dia menyinggung pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu saat menjadi Ketua MK. Dia mengatakan pemilu ulang bisa dilakukan.

“Ketika saya menjadi Ketua MK, MK pernah memutuskan pembatalan hasil pemilu dalam bentuk per-

intah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa,” tuturnya.

Mahfud memberikan tiga contoh. Salah satunya adalah pembatalan dan pelaksanaan ulang Pilkada Jawa Timur 2008 antara Khofifah Indar Parawansa dan Soekarwo.

“Misalnya saya sebut contohnya, hasil Pemilu Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua, hasil Pilkada Bengkulu Selatan yang menang didiskualifikasi, yang bawahnya langsung naik. Tiga, hasil Pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya,” kata Mahfud.

Dia mengatakan istilah pelanggaran terstruktur dan sistematis dalam pemilu muncul sebagai vonis pengadilan 2008. Dia mengatakan vonis itu menjadi awal dasar dan landasan terbuktinya adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu.

“Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008, ketika MK memutus sengketa pilgub antara Khofifah dan Soekarwo, saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita,” kata Mahfud.

“Jadi ini sudah menjadi yurisprudensi dan menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada.

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu. Jadi ini bukan hanya yurisprudensi, sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi,” imbuhnya.

Mahfud mengaku banyak menangan kasus pemilu dibatalkan dan didiskualifikasi. Menurutnya, pemilu ulang dapat dilakukan bergantung ada atau tidaknya bukti dan keberanian hakim menerima bukti tersebut.

“Saya menangan ratusan kasus tentang ini banyak, ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak. Atau kalau sudah punya bukti menerima bukti apa berani apa tidak,” ujarnya. ●RDO





“Kalau soal kualitas personal hal itu tidak terlalu berpengaruh signifikan karena anggota DPD berbeda dengan DPR”

Fatkurohman

UTUSAN DAERAH SUMSEL DIKUASAI SRIKANDI

Meski masih dalam proses penghitungan suara namun sudah terlihat siapa saja yang akan menjadi wakil Sumatera Selatan sebagai utusan daerah. Sama seperti periode lalu, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia untuk Sumatera Selatan masih dikuasai para Srikandi.

Dari empat anggota DPD Sumsel tersebut, tiga diantaranya masih mampu mempertahankan kursinya yakni Eva Susanti, Amaliah Sobli, dan Jialyka Maharani.

Sementara satu pendatang baru anggota DPD RI asal Sumsel periode 2024 - 2029 bakal diraih Ratu Tenny Leriva yang diperkirakan menyingkirkan Arniza Nilawati. Sedangkan di peringkat lima ada nama Hj Yeti Oktarina.

Dengan demikian selama dua periode ini anggota DPD RI masih dikuasai kaum perempuan Sumatera Selatan.

Sedangkan dua nama populer yang sempat diprediksi lolos yakni Nur Kholis SH mantan Anggota Komnas HAM dan Abdul Aziz sebagai mantan anggota DPD RI kalah dalam perolehan suara.

Calon anggota DPD Sumsel periode 2024-2029 nomor urut nomor 16, Ratu Tenny Leriva SKed menjadi pengumpul suara terbesar di Sumatera Selatan dengan meraih lebih dari 550 ribu suara.

Berdasarkan data dari KPU menyebutkan, jumlah ini akan terus bertambah karena baru mencapai 70 persen yang terinput. Sehingga potensi penambahan akan terus terjadi.

Lambung suara Ratu Tenny Leriva di wilayah Kabupaten OKU Timur yang mencapai lebih dari 203 ribu suara. Kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yakni lebih dari 46 ribu suara dan Kabupaten OKU Selatan yang mencapai lebih dari 44 ribu suara.

Nama Ratu Tenny Leriva sangat populer di wilayah OKU Raya ini karena orangtuanya, Herman Deru adalah Bupati OKU Timur selama dua periode dan sekarang menjadi Gubernur Sumatera Selatan.

Sementara pamannya yakni Lanosin atau biasa disapa Enos sekarang menjabat sebagai Bupati OKU Timur.

Melihat jumlah suara yang terkumpul bisa lebih dari 600 ribu, Ratu Tenny berpeluang besar menjadi anggota DPD RI utusan Sumatera Selatan. Jabatan ini juga pernah disandang sang kakak yakni almarhum Percha Leanpuri.

Posisi kedua ditempati Jialyka Maharani yang merupakan seorang incumbent dengan raihan suara lebih dari 290 ribu suara.

Lambung suara sementara Jialyka ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang mencapai lebih dari 43 ribu. Kemudian di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang mencapai dari 37 ribu suara serta Kota Palembang yang mencapai lebih dari 30 ribu.

Nama Jialyka populer di Kabupaten OKI dan OI karena ayahnya adalah mantan Bupati Ogan Ilir, HM Ilyas Panji Alam.

Urutan ketiga ditempati Amaliah Sobli SKG MBA yang juga petahana DPD RI asal Sumsel dengan meraih suara sementara 265 ribu suara. Raihan suara Amaliah ada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang mencapai lebih dari 51 ribu.

Nama Amaliah populer di Ogan Ilir karena ayahnya Sobli Rozali adalah mantan Sekda Pemkab OI. Sementara suaminya, H Handry Pratama Putra menjadi Ketua DPC Partai Demokrat OI sekaligus Ketua DPD KNPI Kota Palembang.

Sehingga tidak heran, raihan suara sementara di Kota Palembang terbilang besar yakni lebih dari 42 ribu.

Peringkat keempat diraih Hj Eva Susanti yang mendapat suara sementara lebih dari 242 ribu dan merupakan seorang incumbent DPD RI asal Sumsel periode 2019 - 2024.

Eva Susanti merupakan istri dari Wahyu Sanjaya, anggota DPR RI asal Partai Demokrat. Di Pemilu 2024, pasangan suami istri ini kembali bakal melenggang ke Senayan.

Raihan suara terbesar Eva Susanti ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mencapai lebih dari 43 ribu

karena dia adalah putri kelahiran wilayah tersebut.

Dia juga mendapat suara signifikan di Kabupaten OKU Selatan dengan meraih lebih dari 31 ribu.

Meski berada di peringkat empat namun suara Eva Susanti terbilang posisi aman karena pesaing terdekatnya yakni Yeti Oktarina baru mencapai 145 ribu. Namun potensi para kandidat untuk menambah suaranya masih terbuka lebar karena sehingga bisa saja terjadi perubahan.

Yeti Oktarina sendiri adalah istri dari Walikota Lubuklinggau, Prana Sohe yang di Pemilu 2024 ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jejaring Keluarga

Lolosnya para senator perempuan sebagai anggota DPD RI tidak lepas dari peran dan jejaring keluarga. Di sisi lain kertas suara DPD juga menampilkan wajah para calon kandidat sehingga mereka akan memilih siapa yang paling menarik.

“Hal ini bisa kita tarik dari kasus Komeng di Jawa Barat. Sementara di Sumsel orang mungkin lebih tertarik dengan perempuan khususnya tokoh-tokoh

muda perempuan. Selain itu mereka yang terpilih ini punya elektoral dari partai, jejaring keluarga dan wilayahnya,” urai pengamat politik dari Public Trust Institute (Putin) Sumsel, Fatkurohman.

Diungkapkan Fatkurohman sebagian besar mereka yang terpilih di DPD karena memanfaatkan jejaring keluarga serta jaringan politik. Cara ini cukup efektif karena lebih terasa dekat dan melekat.

Ratu Tenny Leriva, menjadi calon DPD dengan raihan suara terbanyak di Sumsel karena dibantu pemilih dari kader Partai Nasdem. Jejaring keluarga juga sangat besar karena dia anak seorang Gubernur Herman Deru dan keponakan dari Bupati OKU Timur, Lanosin.

Amaliah Sobli sangat terbantu dari pemilih Partai Golkar dan Gerindra serta suaminya adalah politisi dan mantan anak pejabat.

Jialyka Maharani mendulang suara terbesar kedua karena terbantu suara simpatisan PDIP dan jejaring keluarga. Dimana Jialyka adalah anak mantan Bupati OKI, Ilyas Panji.

Demikian juga Eva Susanti selain dibantu jejaring keluarga dia juga banyak mendulang suara dari simpatisan Partai Demokrat karena suaminya juga seorang politisi dari partai tersebut.

“Kalau soal kualitas personal hal itu tidak terlalu berpengaruh signifikan karena anggota DPD berbeda dengan DPR. Fungsi DPD hanya mengusulkan saja namun tidak bisa ikut memutuskan namun personal branding harus tetap terjaga,” terang Bung FK sapaannya.

Sejauh ini lanjut FK para anggota DPD cukup sering terjun ke lapangan menyoal masyarakatnya. Sehingga personal branding mereka masih terbilang cukup aman. ●RDR



“Ada niatan saya kalau memang mendapat dukungan semua pihak mencalonkan diri sebagai Wali Kota Palembang. Saya yakin Palembang akan menjadi maju dan rakyatnya akan lebih sejahtera”



M Syafran Syaropi

JIWA POLITIK MUNCUL SEJAK KECIL

Bila masa kecil dulu, cita-cita yang paling banyak diucapkan anak-anak adalah menjadi anggota TNI dan Polri, dokter atau pegawai pemerintah. Namun tidak sedikit sekali ada yang berkeinginan untuk menjadi seorang politisi.

Hal ini mungkin menjadi pengecualian bagi seorang Muhammad Syafran Syaropi yang mengaku tertarik dengan politik sejak kecil. Hal ini tentu tidak lain karena ayahnya yakni RM Syaropi adalah salah satu politisi ulung di Sumatera Selatan.

Cita-cita Syafran bisa dikatakan berhasil karena dia sempat mengenyam kursi parlemen di DPRD Kota Palembang selama dua periode (2009 - 2019) dan saat ini aktif menjadi salah satu relawan yang turut aktif di pemilihan presiden (Pilpres) lalu.

Syafran Syaropi kini tergabung dalam tim relawan pendukung Prabowo dan Gibran di Persaudaraan 98 Provinsi Sumsel.

“Sejak SD saja sudah ikut organisasi seperti Pramuka tujuannya memang didik oleh orang tua agar besar nanti menjadi politikus dan mengabdikan diri untuk rakyat sebagai wakil rakyat,” kata Syafran Syaropi.

Dilanjutkannya pendidikan berorganisasi yang didapatkannya tidak hanya putus di bangku SD setelah lulus masuk ke bangku pendidikan SMP yakni di pondok pesantren. Bahkan dia juga menjabat sebagai ketua akbar aliansi keluarga besar pondok.

Kemudian di bangku SMA terlibat dalam organisasi OSIS membuat Syafran lebih gencar mengasah kemampuannya berorganisasi dan berkomunikasi dengan baik sebagai calon politisi handal kelak.

“Setelah dari kecil dididik oleh ayah untuk ikut terlibat dalam organisasi saya kemudian masuk Partai Golkar. Disana saya jadi ketua Golkar tingkat kelurahan dan kecamatan itu sangat lama sampai akhirnya selama 10 tahun menjadi wakil rakyat,” ujar mahasiswa yang berlabel Aktivistis 98 dari kampus Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Fakultas Ekonomi (FE) ini.

Dia sendiri sekarang bertugas sebagai staf ahli di dua tempat yakni Badan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumsel dan di Komisi III DPRD Sumsel.

Sepak terjangnya di dunia politik tidak bisa diragukan lagi karena sudah banyak prestasi diraih terutama masa jabatan

10 tahun di DPRD Kota Palembang 2009-2014 dan berlanjut di gedung DPRD Sumsel hingga tahun 2019.

“Selain staf ahli saya juga bekerja sebagai wiraswasta dan juga terlibat di Tim Relawan pendukung Prabowo dan Gibran dari Persaudaraan 98 Provinsi Sumsel,” ungkapnya.

Dia bercerita alasannya menjadi pendukung Prabowo berawal dari merasa terpanggil sebagai politisi dan jiwa kemanusiaan. Baginya kinerja Prabowo akan membantu banyak sekali rakyat di Indonesia di sana membuat pilihan hatinya menjadi relawan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Jiwa kemanusiaan saya terpanggil makanya saya memilih mendukung Prabowo. Sebab saya menilai Prabowo yang akan menjadi Presiden pasti amanah memikirkan nasib rakyat Indonesia kedepannya. Dari

sanalah saya tergerak untuk mendukung Prabowo,” kata dia.

Syafran Syaropi berkata dia tidak menampik kemenangan Capres Prabowo sementara di real count Pemilu 2024 efek dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang

ikut mendukung anaknya Gibran sebagai Cawapres. Namun semua itu adalah buah pertimbangan atau langkah politik diambil Prabowo sangat tepat.

“Prabowo juga memilih Gibran agar mendapatkan dukungan dari figur Jokowi pastinya penuh dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tidak hanya keputusan

dipikirkan sebentar ditimbang-timbang secara matang. Kami juga tidak menampik efek dan pamor Jokowi bisa membuat kemenangan Prabowo di hitungan sementara sekarang ini,” jelasnya.

Syafran Syaropi juga menerangkan cibiran awal tentang Gibran yang tidak akan dipercaya oleh rakyat terbukti salah. Sebab Gibran mampu ikut andil dalam memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 karena tanpa putra Jokowi juga tidak akan menuai hasil manis di pesta demokrasi yang digelar beberapa waktu lalu.

“Buktinya Gibran bisa bekerja kalau dia dinilai tidak bisa bekerja tidak akan dipilih oleh rakyat. Sekarang lihat dia mendapatkan tempat di hati rakyat dan dipilih untuk dipercaya mendampingi Prabowo nantinya,” tuturnya.

Dia membuka cerita kemenangan Tim Prabowo dan Gibran melakukan trik bergerak senyap membuat para kontestan lainnya tidak terbaca. Mereka melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Anies – Cak Imin dan Ganjar – Mahfud MD.

“Kita memang terlihat santai tetapi sebenarnya kami melakukan gerakan senyap. Kemungkinan apa yang kami lakukan itu tidak dilakukan lawan. Pastinya kami melakukan sesuatu yang membuat hati rakyat benar-benar terasa,” pungkasnya.

Ingin Mengabdikan Lebih Tinggi Lagi

Sebagai seorang politisi dan banyak mengetahui berbagai permasalahan di Kota Palembang, Syafran Syaropi merasa terpanggil untuk mengabdikan lebih tinggi lagi bagi daerahnya.

Di mata Syafran Syaropi, Kota Palembang harus lebih maju dan lebih sejahtera lagi dari yang sekarang ini. Sebagai ibukota provinsi, Palembang harus menjadi simbol keberhasilan Sumatera Selatan di tingkat nasional dan internasional. Untuk itulah perlu berbagai terobosan untuk pembangunan Kota Palembang ini.

“Ada niatan saya kalau memang mendapat dukungan semua pihak mencalonkan diri sebagai Walikota Palembang. Saya yakin Palembang akan menjadi maju dan rakyatnya akan lebih sejahtera,” ujarnya.

Untuk itu dia juga siap menerima masukan dan dukungan dari semua pihak agar bisa mewujudkan niat baiknya tersebut.

Syafran mengaku bersyukur telah mendapat didikan sang ayah, baik dalam ilmu politik maupun kehidupan. Sebagai anak, mereka diajarkan untuk saling menghargai orang lain, mendengarkan pendapat, disiplin dan peduli dengan kondisi lingkungan sekitar.

Sehingga tidak heran sebagian besar dari keluarganya mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi politisi. ●RDR





“Sudah saya tebak karena mereka diuntungkan oleh popularitas serta akses-akses seperti ke penyelenggara, birokrasi maupun logistik”

Ade Indra Chaniago

WAJAH BARU WAKIL DAERAH SUDAH DITEBAK SEJAK LAMA

Ada beberapa wajah baru yang hadir sebagai wakil Sumatera Selatan di DPR RI hasil Pemilu 2024 ini. Meski baru namun mereka yang muncul sesungguhnya sudah bisa ditebak sejak lama. Ada banyak hal yang diyakini kalau mereka ini akan lolos di persaingan menuju Senayan meski penghitungan masih terus berlangsung.

Sosok baru yang akan mewarnai kursi di DPR RI asal Sumatera Selatan 1 antara lain HSN Prana Putra Sohe dari PKB. Sebelumnya Prana Putra Sohe adalah Walikota Lubuklinggau dengan meraih suara sementara lebih dari 44 ribu.

Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumsel dengan suara sementara mencapai 44 ribu lebih.

Yudha Novanza Utama dari Partai Golkar. Pria yang dikenal dengan nama Yudha Bule ini meraih suara sementara lebih dari 53 ribu. Yudha juga dikenal sebagai Ketua Karang Taruna di Sumsel.

Sedangkan di Sumatera Selatan 2 ada nama Ahmad Wazir Noviadi dari Partai Gerindra yang meraih suara sementara cukup fantastis yakni lebih dari 109 ribu. AW Noviadi adalah putra sulung dari Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dan sempat menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir.

HM Giri Ramanda Kiemas dari PDIP dengan meraih suara sementara 41 ribu lebih. Selama ini Giri dikenal sebagai anggota DPRD Sumsel dan menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan.

Kemudian ada nama Dewi Yustiana dari Partai Golkar yang meraih suara sementara mencapai 51 ribu lebih. Dewi Yustiana diketahui putri dari Kahar Muzakir yang merupakan politisi senior di Sumsel.

Selanjutnya ada Hj Samantha Tivani dari Partai Nasdem dengan raihan suara sementara mencapai 105 ribu lebih. Samantha merupakan putri dari Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Ada juga Iskandar SE dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang meraih suara sementara 31 ribu lebih. Iskandar merupakan mantan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI).

Nama-nama baru ini dinilai sudah bisa diprediksi sejak lama. Ada banyak faktor mengapa mereka sudah

diyakini lolos sejak awal. Salah satunya karena faktor politik dan jejaring yang luas serta berpengaruh.

Pengamat politik Ade Indra Chaniago menyebutkan wajah-wajah baru di parlemen yang terpilih menjadi wakil rakyat sudah tertebak olehnya. Secara umum mereka diuntungkan karena memiliki nama besar orangtua, keluarga dan juga memiliki modal besar untuk bertarung di kompetisi Pemilu 2024.

“Sudah saya tebak karena mereka diuntungkan oleh popularitas serta akses-akses seperti ke penyelenggara, birokrasi maupun logistik. Jadi wajar saja walaupun wajah baru sudah terbaca siapa yang menang anak pejabat kepala daerah atau para incumbent,” jelasnya.

Disebutkannya politik uang bukan lagi istilah baru di kompetisi memperebutkan kekuasaan di parlemen. Namun di Pemilu 2024 ini jauh lebih terasa karena arena bermain telah berubah membuat jor-joran politik uang menjadi heboh dan terkesan sangat pekat terasa.

“Sudah hal biasa di politik kalau main uang, namun sekarang lebih terasa wilayah bertarungnya berbeda. Kalau dulu tidak terlalu heboh wilayah bermainnya bisa merubah angka di level PPK. Kalau sekarang sangat beresiko bermain di wilayah PPK sebab sistem digitalisasi semua orang bisa melihat langsung hasil angka. Makanya bermainnya langsung di lapangan seperti kental melakukan serangan fajar atau langsung ke TPS,” jelasnya.

Dari hasil ini harapan apa yang akan diberikan mereka kepada masyarakat Sumsel kedepannya Ade Indra Chaniago pesimis. Menurutnya para pemenang itu tidak memiliki kemampuan dan kemahiran untuk merespon harapan dari

masyarakat Sumsel.

“Saya secara personal tidak yakin bisa diharapkan karena mayoritas dari mereka tidak pernah muncul di ruang publik. Ada lagi duta literasi padahal membaca buku saja belum tentu sering, ada juga yang pernah terlibat narkoba. Saya juga yakin saat kuliah mereka juga tidak pernah ikut terlibat di kegiatan kemahasiswaan apa lagi turun ikut demo mahasiswa,” terangnya.

Ade Indra Chaniago menganalogikan pembeli rokok di warung setelah mendapatkan barang yang dibeli pastinya selesai dan tidak akan berpikir yang lain. Kondisi itu seperti bentuk transaksi politik uang yang terjadi di Pemilu 2024.

“Kalau sudah beli rokok dan dapat rokoknya kalau penjualnya sakit atau anaknya belum makan apakah jadi urusan pembeli rokok? Tentunya tidak akan karena pembeli rokok yang beli rokok tidak peduli dengan kehidupan penjual rokok. Karena yang dibutuhkan rokok sudah dapat yang pulang mau ngapain capek-capek urusin kehidupan penjual rokok,” pungkask akademisi dari STISIPol Candradimuka ini.

Sementara Haekal Al-Haf-fafah dari lembaga kajian politik Teras Indonesia mengatakan,

kondisi sekarang masyarakat tidak memahami konteks politik dan demokrasi masih berdetak lemah. Seharusnya tokoh-tokoh politik memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya demokrasi tersebut.

“Pemilu 2024 ini harus dijadikan pelajaran kedepannya harus banyak tokoh yang menyuarakan kepada masyarakat pentingnya demokrasi,” jelasnya.

Pemilu 2024 hari ini disebutnya seakan-akan terjadi disengaja untuk beternak kekuasaan dari kepala daerah incumbent yang mengajak keluarganya masuk ke parlemen.

“Beternak kekuasaan setiap pemilu itu tentunya kondisi yang tidak baik! Banyak anak-anak dari penguasa itu tiba-tiba bukan kader dari partai. Hanya seminggu masuk langsung mencalonkan diri dapat nomor 1,” jelasnya.

Dia menyebutkan semua wajah-wajah baru di parlemen itu apabila menjalankan tugas tidak akan mampu menjalankan kebijakan yang benar. Untuk kerja di parlemen bisa berjalan namun harapan dan masyarakat Sumsel tidak akan diprioritaskan wakil rakyat.

“Di parlemen pasti ada staf ahli, ada dana bisa menjalankan berbagai kegiatan namun semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Saya pesimis mereka bisa menjalankan program yang benar-benar bisa tepat untuk kepentingan masyarakat Sumsel,” ungkapnya.

Kondisi itu dinilai karena faktor ekonomi masyarakat Indonesia berdampak kepada kualitas demokrasi tidak terjaga. Faktor kemiskinan mengguncang tatanan pesta demokrasi yang terjadi solusinya hapuskan demokrasi tersebut.

“Selagi ekonomi sulit demokrasi tidak akan berjalan sistem pemilihan tertutup lebih efektif. Karena adanya sistem itu partai politik akan berjalan sehat. Dikarenakan kader-kader terbaik parpol pastinya akan dipilih untuk menjadi wakil rakyat di parlemen bukan dipilih secara terbuka seperti ini,” pungkasknya. ●RDR



“Mudah-mudahan (ada penambahan) karena hasil penghitungan baru mencapai 60 persen masih ada 40 persen lagi”



Kartika Sandra Desi

MASIH ADA RUANG UNTUK WAKIL PEREMPUAN

Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini masih terus berjalan, sudah ada beberapa nama yang dipastikan lolos ke Senayan dari wilayah Sumatera Selatan. Dari sekian banyak nama tersebut ada beberapa tokoh wanita yang lolos sebagai wakil Sumatera Selatan di parlemen nanti.

Dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 ada satu orang perempuan yang dipastikan lolos ke Senayan yakni Kartika Sandra Desi dari Partai Gerindra. Untuk sementara Wakil Ketua DPRD Sumsel ini meraih lebih dari 45 ribu suara.

Sementara di Dapil Sumatera Selatan 2 cukup banyak wakil perempuan yang akan lolos ke Senayan nanti.

Tercatat ada nama Sri Meliyana dari Partai Gerindra yang meraih suara sementara mencapai 44 ribu lebih.

Dewi Yustisiana SH dari Partai Golkar yang mengumpulkan suara sementara mencapai 51 ribu lebih.

Partai Nasdem bahkan mengirimkan dua wakil perempuannya yakni Hj Samantha Tivani BBus yang telah mengumpulkan suara sementara hingga 105 ribu lebih dan Irma Suryani dengan raihan suara sementara mencapai 97 ribu lebih.

Selain ada juga potensi penambahan dari wakil perempuan ini seperti Hanna Gayatri dari PAN yang kini bersaing ketat dengan Iskandar untuk memperebutkan satu kursi ke Senayan.

Kemudian ada juga Hj RA Anita Noerihati dari Partai Golkar yang kini menduduki peringkat ketiga dengan raihan suara sementara mencapai 28 ribu lebih. Peluang Ketua DPRD Sumsel ini tetap terbuka lebih andai Partai Golkar sukses mengirim tiga wakilnya ke Senayan.

Peluang dan potensi itu bisa terus terjadi karena hingga kini penghitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tanggal 22 Februari baru mencapai 61 persen untuk Dapil Sumsel 1 dan 69,44 persen untuk Sumatera Selatan 2.

Melihat hasil yang diraih tersebut beberapa partai politik cukup senang karena bisa memenuhi atau mempertahankan pencapa-

ian yang sudah ada.

Ketua Partai Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan meski saat ini masih terus melakukan pendataan namun pencapaian mereka di Pemilu 2024 cukup baik.

Selain berhasil memenangkan calon presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming di Sumsel dengan cukup besar, Partai Gerindra juga bakal meloloskan tiga kadernya ke DPR RI.

Sehingga mereka juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sumsel yang telah mempercayakan Partai Gerindra di parlemen nanti.

“Secara pribadi tugas saya adalah penguatan partai, dan sampai saat ini masih terus melakukan penghitungan karena walaupun bagaimanapun hasil yang diperoleh saat ini belum sesuai dengan harapan kami karena target awal kami ingin tetap mempertahankan dua kursi perwakilan dari Dapil Sumsel satu. Itu yang masih kami koreksi sambil terus melakukan pemantauan hasil penghitungan data dari C 1 tentunya,” ungkap Kartika Sandra Desi.

Diungkapkan wanita yang biasa disapa Cici ini, perhitungan di KPU saat ini belum sesuai dengan target ka-

rena perolehan suara Partai Gerindra di Sumsel jauh agak berbeda dengan perolehan pada pemilu 2019 yang lalu.

Perolehan suara pada pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu 2019 agak meleset. Dimana Partai Gerindra pada Pemilu 2019 menduduki peringkat pertama dan memperoleh suara terbanyak dan saat itu untuk wakil dari Sumsel untuk DPR RI memperoleh dua kursi.

“Sedangkan untuk saat ini jika kita melihat dari situs resmi KPU rekap C1 walaupun belum secara keseluruhan, saat ini Partai Gerindra tidak berada di peringkat pertama, dan untuk wakil dari Dapil Sumsel satu malah belum tercapai,” terang Wakil Ketua DPRD Sumsel ini.

Disisi lain mereka juga senang karena Partai Gerindra sudah memastikan dua kursi di DPR RI yang disumbangkan dari Dapil Sumatera Selatan 2. Dengan demikian target Partai Gerindra Sumsel untuk mengirimkan wakilnya ke Senayan sudah tercapai.

Untuk perwakilan kader partai di daerah-daerah juga sebagian telah tercapai, termasuk DPRD Provinsi target awalnya 15 kursi. Sedangkan untuk tahapan penghitungan sementara saat ini sudah tercapai 12 kursi.

“Jadi target kita masih mengejar 3 kursi lagi, dan saat ini masih

menunggu hasil penghitungan resmi, intinya kami masih terus berusaha untuk mengejar target tersebut sambil menghitung dan mengoreksi selisih penghitungan serta masih menunggu C 1,” urai Cici.

Diakui Cici, dalam proses penghitungan suara ini mereka butuh banyak energi sehingga banyak saksi yang mereka kirim juga mengalami kelelahan. Sehingga proses penghitungan suara juga sedikit terhambat.

Partai Gerindra Sumsel juga bangga karena diperkirakan akan berhasil merebut kursi DPRD Sumsel.

“InsyaAllah Partai Gerindra dapat merebut target kursi Ketua DPRD Sumsel karena saat ini persaingan dan kejar-kejaran dengan Partai Golkar, dan masih menunggu hasil suara. Sampai saat ini kami masih berkeyakinan penuh dapat merebutnya, Bismillah,” terangnya.

Partai Gerindra sendiri terbilang sukses besar bila berhasil meloloskan kadernya ke DPR RI dari Sumsel 1 yakni atas nama Kartika Sandra Desi sendiri.

Peluang itu terbuka lebar bahkan bisa saja menambah dua kursi lagi. Berdasarkan real count KPU yang baru mencapai 61 persen, Partai Gerindra sudah mengumpulkan 119 ribu suara. Dimana Kartika Sandra Desi ada di peringkat pertama dengan raihan sementara 45 ribu lebih.

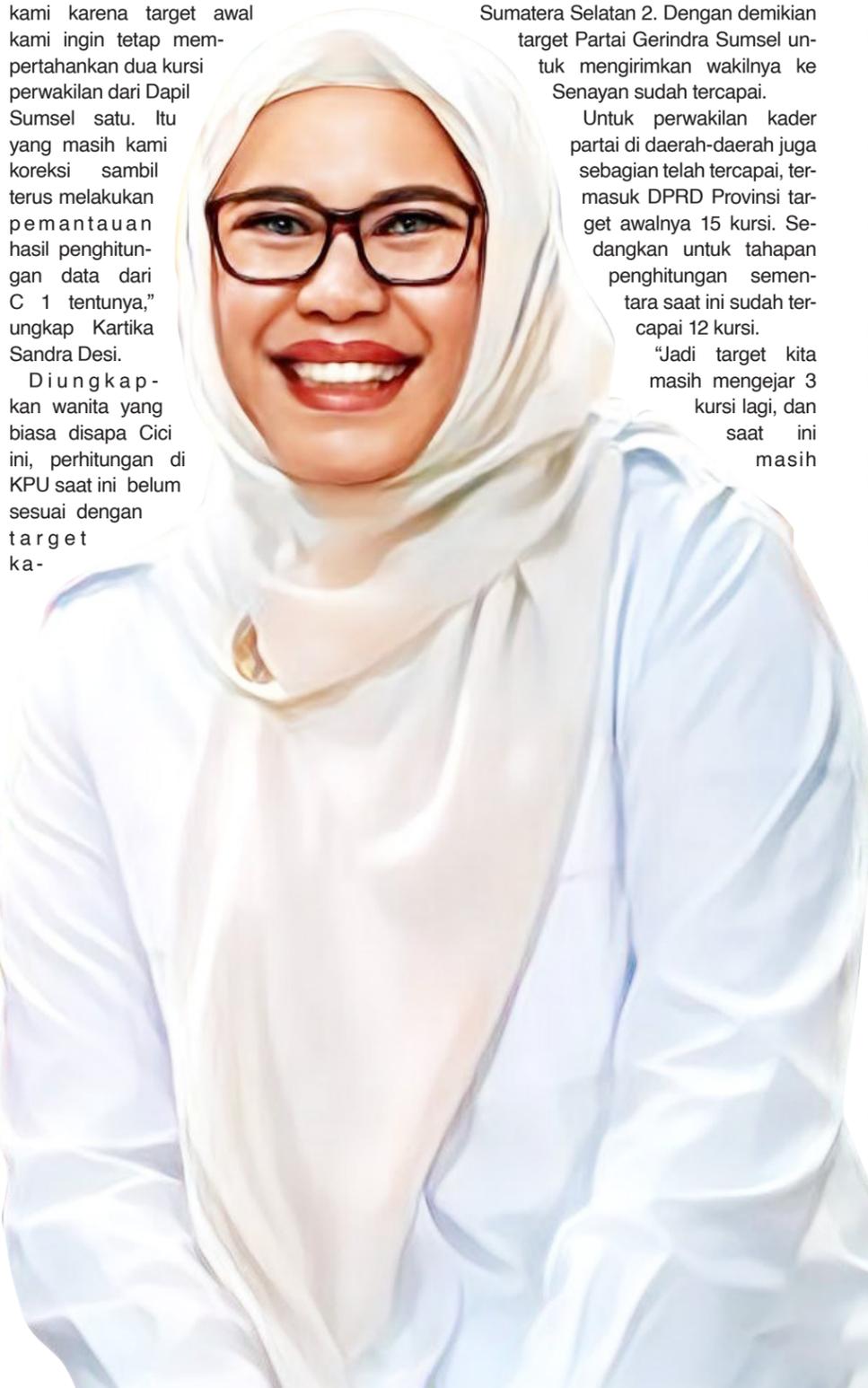
Kader Partai Gerindra lainnya, Siti Nurizka Puteri Jaya juga berpeluang meraih satu kursi karena saat sudah mengumpulkan 20 ribu lebih dan berpotensi terus bertambah.

“Yang jelas niat awal saya adalah untuk mengabdikan dan bermanfaat untuk masyarakat Sumsel, yang pasti saya akan berfokus pada infrastruktur dan pendidikan. Nanti akan kita bagilah dengan kawan-kawan yang duduk di Senayan DPR RI dari Gerindra. InsyaAllah jika target kami tercapai kami bisa membagi pemetaan karena tidak cukup dengan perjuangan kita sendiri,” tegasnya.

Kartika Sandra Desi juga berharap wakil perempuan di DPR RI banyak bermunculan. Hal ini sudah terlihat di Dapil Sumatera Selatan 2. Sementara di Dapil Sumsel 1 masih Kartika Sandra Desi satu-satunya yang tercatat.

“Mudah-mudahan (ada penambahan) karena hasil penghitungan baru mencapai 60 persen masih ada 40 persen lagi. Saya yakin kawan-kawan mempunyai basis. Mungkin basisnya belum terhitung karena ada kabupaten yang cepat melakukan penghitungan. Yang pasti saya mendoakan untuk kawan-kawan yang lain bisa sukses semua,” ujar dia.

Sedangkan dari perhitungan internal partai, Kartika Sandra Desi optimis bisa menyumbangkan satu kursi DPR RI dari Sumatera Selatan 1. Suara yang telah diproses internal partai sudah mencapai 90 persen, dari hasil tersebut jumlah suaranya tentu jauh lebih besar dari data sementara KPU sekarang masih dalam proses penghitungan. ●RDR





“Apalagi DNA Surya Paloh ini kan nggak bisa berposisi dengan Jokowi. Kalau yang dilihat dari luar mereka berantem dan sebagainya, menurut saya tidak, hanya gimmick”

Adib Miftahul

JOKOWI BUJUK SURYA PALOH NASDEM GABUNG PRABOWO-GIBRAN

Belum genap sepekan pemungutan suara usai, manuver politik para elite mulai terlihat. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diketahui menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Minggu, 18 Februari 2024 malam.

Pihak Partai Nasdem mengklarifikasi bahwa pertemuan itu bukanlah permintaan Surya, melainkan undangan dari Jokowi.

“Kehadiran Ketua Nasdem Pak Surya Paloh di Istana Negara adalah memenuhi undangan makan malam Presiden Jokowi,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim.

Hermawi menegaskan, pihaknya meluruskan informasi yang beredar bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Jokowi, sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Staf Presiden Ari Dwi-payana.

Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi disebut berlangsung secara tertutup. Saat ditanya mengenai isi dari pertemuan tersebut, Hermawi tidak merespons lebih lanjut.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi-payana mengkonfirmasi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Merdeka guna membahas berbagai hal, termasuk dinamika politik dan juga pemilu. Selain itu, keduanya juga bertemu membahas masalah kebangsaan dan juga berbagai tantangan global.

“Silaturahmi membicarakan agenda-agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global, termasuk hal-hal yang terkait dinamika politik dan pemilu,” kata Ari.

Ari kembali menjelaskan, silaturahmi Presiden Jokowi dengan berbagai tokoh bangsa dan politik sangat baik dilakukan. Apalagi, kata dia, untuk kebaikan bangsa dan negara.

“Seperti yang disampaikan Presiden beberapa waktu yang lalu, silaturahmi dengan tokoh bangsa, dengan tokoh politik sangat baik, apalagi untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri mengaku ingin menjadi jembatan untuk semua urusan politik hingga partai. Peranan sebagai perantara, kata Jokowi, diawali dengan bertemu Surya Paloh.

“Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final nanti kami (kabarkan). Namun saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai,” kata Jokowi di RSPPN Panglima Besar Soedirman, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024.

Jokowi enggan membeberkan soal perincian peran perantara yang sedang dilakukannya itu. Dia mengatakan, pertemuan dengan Surya Paloh merupakan pertemuan politik biasa.

“Ya pertemuan politik biasa. Berbicara masalah politik juga biasa,” kata Jokowi.

Dia mengaku, pertemuan tersebut akan bermanfaat bagi perpolitikan nasional. “Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara kita. Yang paling penting itu,” tutur Jokowi.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh merupakan sinyal kuat akan bergabungnya Nasdem dengan koalisi Prabowo-Gibran.

Menurut Ujang, pertemuan tersebut turut melibatkan Presiden Jokowi yang pada Pilpres 2024 berperan sebagai king maker, penentu kemenangan Prabowo-Gibran.

“Saya mengamatinya bahwa ini indikasi sinyal bahwa Nasdem bisa saja akan merapat ke koalisi keberlanjutan yaitu koalisi Prabowo-Gibran,” kata Ujang, Senin, 19 Februari 2024.

Dikatakan Ujang, Jokowi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan Nasdem dengan semua pihak yang berada di Koalisi Indonesia Maju.

“Dalam konteks itu, saya melihat Pak Jokowi bisa menjadi bridging atau jembatan bagi Pak Surya Paloh dengan Prabowo-Gibran atau Koalisi Indonesia Maju dan dipertegas juga dengan ucapan Pak Jokowi. Saya melihatnya bahwa pertemuan tersebut mengindikasikan bahwa Nasdem siap merapat untuk membangun koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Lebih jauh, Ujang berpendapat pertemuan tersebut juga turut membahas soal jatah kursi menteri yang diberikan, andai saja Nasdem bergabung.

“Kalau saya menilai tentu berbicara soal power sharing tentang berapa banyak, seberapa besar kuota menteri seandainya Nasdem bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau (Nasdem) bergabung tidak mungkin hanya dengan tangan kosong. Dukungan itu selaras dengan imbalan juga,” tuturnya.

Analisis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Nasdem dan PKB berpotensi besar bergabung koalisi Prabowo-Gibran yang dinyatakan menang versi quick count. Apalagi, Surya Paloh sudah bertemu dengan Presiden Jokowi yang dinilai sebagai upaya membangun koalisi pasca Pilpres 2024.

“Terbuka kemungkinan Nasdem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini tidak hanya kebutuhan kekuatan politik di parlemen, namun juga cairnya koalisi politik di Indonesia bahwa partai yang kalah di pilpres masih ada ruang untuk ikut dengan pemenang,” ujar Arifki,

Rabu, 21 Februari 2024.

Sejauh ini, kata Arifki, kemenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden belum didukung oleh kekuatan partai pengusung seperti Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang belum sampai 50 persen (hasil Pemilu 2024). Karena itu, wajar jika Prabowo-Gibran juga harus mencari partai lain untuk bergabung agar menguasai kekuatan mayoritas di parlemen.

“Karena secara tidak langsung Prabowo-Gibran tentu ingin cepat meloloskan beberapa program tanpa harus banyak kompromi dengan kekuatan politik di parlemen,” tegasnya.

Arifki menambahkan, partai yang tegas menyatakan bakal menjadi oposisi adalah PDIP. Menurut dia, konsolidasi PDIP untuk merangkul partai pengusung paslon 1 dan 3 bakal mengubah konstelasi politik menjelang transisi politik dari Jokowi ke Prabowo.

“Dari sejumlah partai pengusung paslon 1 dan 3, PDIP dan PKS partai yang berpotensi menjadi oposisi. Sedangkan yang lain berpotensi gabung pemerintahan jika ditawarkan kursi menteri. PKS pun juga ada kecenderungan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena PKS lama menjadi sekutu Prabowo di politik dan PKS juga sudah sudah lama berpuasa sebagai partai oposisi,” kata Arifki.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh menunjukkan bahwa koalisi perubahan sudah selesai.

“Tanggapan saya pertama, Surya Paloh, Nasdem, bahkan bisa koalisi perubahan sudah selesai. Dalam arti kata bahwa (kehadiran Surya Paloh) ke istana itu menurut saya bisa dinilai sebuah pengondisian,” kata Adib,

Selasa, 20 Februari 2024.

Adib menyatakan bahwa pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh merupakan momentum sangat tepat mengingat kubu 1 dan 3 menolak kemenangan Prabowo-Gibran quick count dalam Pilpres 2024.

“Pertemuan Surya Paloh itu momentumnya sangat tepat, ketika 1 dan 3 masih menolak mengakui kemenangan walau secara quick count. Tapi kalau dasarnya bahwa tidak pernah ada quick count itu di atas 3 persen, misalnya yang selisih dengan real count,” ucapnya.

“Saya kira beliau-beliau itu tahu secara metodologi penelitian real count itu menggambarkan bahwa sebenarnya pertarungan pilpres selesai sehingga ketika Surya Paloh bertemu Jokowi, menurut saya games is over (permainan sudah selesai) bahwa pengondisian sedang berlangsung,” sambung Adib.

Dosen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ini juga menilai bahwa sejatinya dalam perjalanan politik Partai Nasdem besutan Surya Paloh itu tidak pernah beroposisi dari pemerintahan Jokowi.

“Apalagi DNA Surya Paloh ini kan nggak bisa berposisi dengan Jokowi. Kalau yang dilihat dari luar mereka berantem dan sebagainya, menurut saya tidak, hanya gimmick saja. Yang terjadi sekarang adalah, ada rekonsiliasi nasional demi persatuan bangsa,” tuturnya.

Bahkan, kata Adib, kala Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden 2019, partai politik yang bertahan sebagai oposisi hanya PKS dan Demokrat.

“Jokowi sudah bisa membuktikan itu koalisi gemuknya yang tersisa hanya PKS dan Demokrat kemarin, kan gitu.

Yang kedua alasan normatifnya bisa dinilai ini bentuk rekonsiliasi nasional sudahlah ngapain capek-capek ribut pilpres kecurangan segala macam, kita selesaikan saja, bisa juga seperti itu,” pungkasnya.

●RDO



“Jelas pelantikan AHY menjadi Menteri ATR, memastikan Demokrat sudah jadi bagian koalisi pendukung Presiden Jokowi. Ini dapat mengisi posisi atau suara yang ditinggalkan PDIP”



Asrinaldi

DEMOKRAT KUATKAN POSISI JOKOWI

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), resmi dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 21 Februari 2024.

AHY menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sebagai pengganti Mahfud MD.

Melalui instagramnya @agusyudhoyono, AHY mengatakan bahwa ini adalah amanah dari Presiden Jokowi. “Kemarin (20/2), saya mendapatkan amanah dari Bapak Presiden @jokowi,” kata AHY.

Sebelum dilantik, AHY mengaku terlebih dahulu melapor kepada Prabowo Subianto, capres terpilih menurut quick count. “Sebagai junior, sekaligus anggota Koalisi Bapak @prabowo tentu saya perlu melaporkan amanah tersebut pada beliau. Kesolidan koalisi hanya dimungkinkan oleh komunikasi dan koordinasi yang intens dan sangat erat,” ucap AHY.

Selain melapor ke Prabowo, AHY mengaku juga mendapatkan dukungan moral dari Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Menurut AHY, baik Prabowo, Airlangga dan juga Zulhas senang dengan penunjukkan dirinya sebagai Menteri ATR/BPN.

AHY mengungkapkan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersyukur dirinya ditunjuk menjadi Menteri ATR/Kepala BPN.

Bergabungnya AHY di kabinet menjadi momentum bagi Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. AHY pun menyebut hal ini merupakan momentum bersejarah karena selama sembilan tahun terakhir Demokrat berada di luar pemerintahan.

“Beliau (SBY) tentunya juga bersyukur karena ini menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan. Dan ini sebuah momentum bersejarah,” kata AHY.

AHY mengatakan, perjuangan Demokrat selama ini akhirnya bisa direalisasikan jika bergabung di pemerintahan secara langsung. Sebab, kebijakan ada di tangan eksekutif meskipun posisi di parlemen juga sangat penting.

“Dengan demikian, menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju menuju akhir masa kepemimpi-

nan,” ujarnya.

Putra SBY itu pun berharap, bergabungnya Partai Demokrat di pemerintahan bisa membawa kemajuan bagi negara. Kendati demikian, AHY mengatakan masih perlu adaptasi untuk bergabung dalam pemerintahan.

AHY juga menegaskan Partai Demokrat akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga tuntas. “Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin sesuai dengan kebijakan partai. Kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kami semua sampai dengan tuntas,” kata AHY.

Meski bergabung di pemerintahan, AHY memastikan, Demokrat akan selalu bijak menggunakan suaranya di parlemen. Ia juga menegaskan tidak akan terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengatakan penunjukkan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN mempertegas bahwa ada korelasi antara pemerintahan Presiden Jokowi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Demokrat mulai kian mesra dengan pemerintahan Jokowi begitu sudah bergabung ke KIM.

Selain itu, AHY juga sowan ke Prabowo, serta berkomunikasi dulu dengan Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan sebelum pelantikan. Prabowo, Airlangga, dan Zulhas selain sebagai menteri Jokowi, juga ketua umum parpol pengusung Prabowo-Gibran.

Meski begitu, Aditya melihat upaya Demokrat ingin masuk ke dalam pemerintahan Jokowi bukan hanya

pada momen Pilpres 2024. Keinginan Demokrat berada di lingkaran kekuasaan sudah terendus sejak dua tahun lalu. AHY gencar menjalin komunikasi dengan Jokowi, Puan Maharani dan tokoh-tokoh parpol pemerintah yang lain.

“Memang ini sudah kita baca sejak hampir 2 tahun lalu bagaimana Demokrat punya keinginan untuk masuk ke dalam pemerintah dan merespon positif oleh Jokowi. Dalam beberapa kali kesempatan reshuffle belum kejadian. Momentumnya sekarang,” ucap Aditya.

Pakar politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan Partai Demokrat yang memiliki 54 kursi di DPR RI periode 2019-2024 dapat sedikit menutup celah pendukung pemerintahan Jokowi di parlemen.

Menurut Asrinaldi, Jokowi hampir dipastikan akan ditinggalkan oleh partainya PDIP yang sudah berancang-ancang akan mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Asrinaldi menyebut bergabungnya Demokrat akan membuat kekuatan kubu pendukung pemerintahan Jokowi tetap stabil.

“Jelas pelantikan AHY menjadi Menteri ATR, memastikan Demokrat sudah jadi bagian koalisi pendukung Presiden Jokowi. Ini dapat mengisi posisi atau suara yang ditinggalkan PDIP,” kata Asrinaldi.

Saat ini, ada wacana DPR akan mengajukan hak angket untuk mengoreksi indikasi kecurangan

Pemilu 2024. Hak angket ini rencananya akan diusulkan partai-partai pendukung Anies-Muhaimin yakni PKB, Nasdem dan PKS dan juga partai pengusung Ganjar-Mahfud, yakni PDIP dan PPP.

Asrinaldi menilai Demokrat yang memiliki kursi cukup banyak di DPR akan ikut jadi garda depan untuk menjaga pemerintahan Jokowi. “Demokrat kini akan memainkan narasi membela Jokowi. Berbeda dengan 9 tahun sebelumnya yang identik sebagai pengkritik pemerintahan Jokowi,” ucap Asrinaldi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menilai langkah Presiden Jokowi menarik AHY bergabung ke dalam pemerintahannya sebagai upaya memperkuat posisi pemerintah di parlemen. Terlebih saat ini beberapa partai di parlemen mewacanakan hak angket dan hak interpelasi terhadap presiden. PDIP disebut menjadi inisiatif hak angket tersebut.

“Jokowi ingin memastikan bahwa Pemilu kemarin tak akan mendapatkan dukungan terhadap hak angket atau interpelasi di DPR yang sudah diwacanakan PDIP,” kata Dedi.

Dedi melihat Jokowi khawatir karena dua partai pendukungnya Nasdem dan PKB sudah tidak lagi loyal lantaran menjadi pengusung pasangan Anies-Muhaimin. Walau masih berada dalam pemerintahan, Nasdem dan PKB saja membelot dan ikut mendukung hak angket Pemilu bersama PDIP. Karena hak angket yang coba diajukan PDIP berkaitan dengan hasil perolehan suara Anies-Muhaimin.

“Itulah sebab Demokrat ditarik dalam rangka mencapai kekuatan pemerintah cukup besar membuat Jokowi soft landing di periode kedua ini,” ucap Dedi.

Selain itu, menarik AHY ke dalam pemerintahan juga sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Demokrat terhadap Prabowo-Gibran yang juga ada Jokowi di belakangnya.

“Kinerja Demokrat dalam Pemilu 2024 sebetulnya tak terlalu besar. Kalau pun ada kontribusi dalam kemenangan Prabowo, besar kemungkinan akan diberikan di masa Pemerintahan Prabowo,” imbuhnya. ●
RDO





“Perkembangan Kota Gorontalo yang kian pesat ini, pasti merupakan hasil dari kerja-kerja dari Marten Taha, yang memiliki nilai sempurna untuk kepemimpinannya”

Elly Engelbert Lasut

BAWA VISI KEMAJUJUAN GORONTALO

Nama Wali Kota Gorontalo, Marten Taha semakin kuat dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo 2024.

Elektabilitas Marten Taha, nampaknya tidak perlu dipertanyakan lagi di beberapa kalangan, termasuk di luar daerah seperti Sulawesi Utara.

Marten Taha, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, dianggap memiliki kemampuan sebagai pemimpin yang luar biasa, bukan hanya saat ini, tetapi bahkan sejak masa pendidikannya, dia sudah menunjukkan bakat kepemimpinan yang luar biasa.

Marten Taha, telah menerima surat perintah pencalonannya sebagai Gubernur Gorontalo dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Dalam surat perintah tersebut, Marten dipilih sebagai calon Gubernur melalui proses penjurangan internal Partai Golkar.

Ini menegaskan bahwa Marten, yang telah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, telah diterima sebagai kandidat yang direkomendasikan oleh partai untuk bertarung pada Pilkada 2024 mendatang.

Marten menjelaskan bahwa proses pencalonannya melibatkan pengusulan dari DPD Partai Golkar Gorontalo.

“Hasil keputusan dari partai secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga DPD I dan II melalui Rakerda dan Musda, nama saya diusulkan sebagai salah satu kandidat untuk dicalonkan sebagai Gubernur Gorontalo,” ujar Marten, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, hasil keputusan tersebut diusulkan ke DPP Partai Golkar untuk menentukan kesesuaian dengan keinginan partai.

“Keputusan akhir ada di tangan DPP, sedangkan di daerah hanya melakukan pengusulan,” tambahnya.

Nama-nama yang diusulkan oleh DPD Golkar Gorontalo dipanggil oleh pihak DPP. Marten termasuk salah satu dari empat kandidat yang diusulkan.

“Kemarin, kami dipanggil oleh DPP, dan kami telah menerima surat perintah tugas (Sprint) itu,” ungkapnya.

Marten siap melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh DPP Golkar. Tugas tersebut meliputi mensukseskan Pileg dan Pilpres 2024 yang didukung oleh Partai Golkar serta melakukan sosialisasi diri ke masyarakat Gorontalo dan bertemu dengan para konstituen.

“Tugas-tugas ini pasti akan

dievaluasi oleh DPP, dan tim akan diturunkan untuk memantau pelaksanaannya serta meningkatkan elektabilitas para calon,” jelasnya.

Marten menganggap surat perintah tersebut sebagai tiket menuju posisi Gubernur Gorontalo. Namun, ia menyadari bahwa masih ada langkah-langkah yang harus dijalani sebelum benar-benar menjadi calon Gubernur.

“Ini hanya sebuah tiket, yang belum bisa digunakan tanpa boarding pass,” kata Marten dengan canda.

Dengan menerima surat perintah tersebut, Marten melewati titik aman kedua dalam proses pencalonan. Titik aman pertama adalah ketika namanya diusulkan oleh DPD Golkar Gorontalo sebagai calon Gubernur Gorontalo.

“Katakanlah ini sudah di titik aman kedua, masih ada tahapan berikutnya sebelum saya benar-benar dicalonkan sebagai Gubernur Gorontalo,” tambahnya.

Bupati Kepulauan Talaud, Elly Engelbert Lasut, yang juga merupakan sahabat dekat Marten Taha sejak masa muda mengakui bahwa Marten Taha adalah sosok calon pemimpin yang sangat mumpuni untuk Pilgub Gorontalo 2024.

Marten Taha, kata Elly, diyakini mampu membawa banyak perubahan untuk Gorontalo.

Elly Lasut juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan Marten Taha selama dua periode telah membuktikan kehebatannya sebagai seorang pemimpin, dengan banyaknya kemajuan yang telah dicapai oleh

Kota Gorontalo saat ini.

Dengan demikian, menurutnya, tidak ada keraguan lagi bahwa Marten Taha adalah calon yang tepat untuk menjadi Gubernur Gorontalo, sehingga visi kemajuan Gorontalo dalam lima tahun mendatang bisa terwujud.

“Saya memberikan dukungan penuh dan doa-doakan agar Kak Marten dapat menjadi calon gubernur. Semoga di masa depan, kita dapat bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut, dengan melakukan kolaborasi yang lebih mendalam, dan kemudian mengajukannya bersama,” tandasnya.

Elly Lasut mengatakan bahwa perkembangan Kota Gorontalo sendiri, di bawah kepemimpinan

Marten Taha terus mengalami perkembangan yang pesat.

“Tentu saja, perkembangan Kota Gorontalo yang kian pesat ini, pasti merupakan hasil dari kerja-kerja dari pak Marten Taha, yang memiliki nilai sempurna untuk kepemimpinannya”, ungkap Elly Lasut.

Dirinya pun menyebut, jika Wali Kota Marten Taha layak untuk maju sebagai calon Gubernur Gorontalo pada Pilkada mendatang.

Nama lengkap Marten Agus Taha lahir 29 Agustus 1959, berkarir politik sejak 1987. Karier politiknya sempurna karena menjabat anggota DPRD sebanyak 7 periode, tanpa putus.

Dia menjabat Anggota DPRD sejak Gorontalo masih bergabung dengan Sulawesi Utara. Empat periode di Provinsi Sulut dan 3 periode di Gorontalo ditambah 2 periode sebagai wali kota.

Sebelum terjun ke dunia politik, Marten Taha atau akrab dengan sapaan MT berkarir di perusahaan Swasta pada medio 1982 - 1987. Kemudian menjadi direktur utama di PT Olah Karya Pratama pada 1987 - 1997.

Pada tahun 1987 itu pula Marten Taha mulai terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara selama 4 periode, terhitung dari 1987 - 2001.

Kemudian Marten Taha menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2 periode dimulai tahun 2001-2009.

Pada tahun berikutnya, ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2009-2014.

Sebelum akhirnya menjabat menjadi Wali Kota Gorontalo dimulai dari tahun 2014 sampai saat ini.

Marten Taha menjadi Walikota Gorontalo selama dua periode, dengan

dua pasangan yang berbeda. Periode pertama berpasangan dengan Charles Budi Doku, kemudian periode kedua bersama Ryan F Kono. •IRY



“Semua elemen partai akan berkerja keras demi menyuk- seskan Desy Ratnasari. Ten- tunya dengan target meraih kemenangan”



Zulkifli Hasan

TARGET KEMENANGAN PAN UNTUK DESY RATNASARI

Ketua DPW PAN Jawa Barat, Desy Ratnasari telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar) 2024.

Dia mengungkapkan bahwa telah diberikan mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik sebagai Calon Gubernur (Cagub) maupun Calon Wakil Gubernur (Cawagub).

“Sebagai Ketua Umum DPP PAN, saya telah diberikan mandat untuk turut serta dalam Pilkada, baik sebagai Cagub maupun Cawagub Jabar,” kata Desy Ratnasari.

Desy Ratnasari, yang dikenal sebagai pelantun lagu “Tenda Biru”, menyatakan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan mendampingi sebagai calon gubernur atau wakil gubernur sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

“Kesimpulannya, saya akan mengikuti arahan dari pusat, terkait dengan pasangan politik saya. Hal ini sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum kami, Zulkifli Hasan,” katanya.

Desy Ratnasari menegaskan kembali bahwa sebagai se-

orang kader, dia siap untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh pimpinan partai.

“Apapun keputusan beliau, saya akan mentaatinya sebagai kader partai,” tambahnya.

Desy Ratnasari sendiri adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 dari PAN, dan dia ingin meneruskan tanggung jawabnya untuk periode pemerintahan selanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PAN Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, baru-baru ini menyebutkan bahwa ada dua tokoh yang memiliki potensi besar untuk diusung sebagai Cagub Jabar, yakni Bima Arya, Walikota Bogor, dan Desy Ratnasari sendiri, yang juga merupakan

anggota DPR RI.

Meskipun begitu, belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan diusung, mengingat pemilihan gubernur Jabar berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Diketahui sebelumnya, PAN akan mengusung kader sendiri pada Pilgub Jabar 2024.

Nama yang diusung adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Jabar, Desy Ratnasari.

“Calon gubernur Jawa Barat Teh Desy,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Zulkifli memastikan bahwa semua elemen partai akan bekerja keras demi menyuk- seskan Desy Ratnasari maju pada Pilgub Jabar 2024.

“Semua elemen partai akan berkerja keras demi menyuk- seskan Desy Ratnasari. Tentunya dengan target meraih kemenangan,” jelasnya.

Dilansir dari Wikipedia, sosok Desy Ratnasari adalah salah satu kader terbaik PAN, wanita kelahiran 12 Desember 1973 seorang aktris, politikus, pembawa acara televisi, penyanyi, dan model Indonesia.

Desy Ratnasari memulai kariernya dari dunia modeling dengan meraih juara kedua pada pemilihan GADIS Sampul tahun 1988.

Ia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah di Sukabumi, Jawa Barat, meraih gelar Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Terapan, dan Magister Psikologi Profesi dengan predikat cum laude.

Sebelum terjun ke politik, Desy dikenal sebagai seorang aktris yang telah meraih berbagai penghargaan atas karya seni perannya.

Ia juga terkenal dengan lagu

“Tenda Biru” yang sukses besar di dunia musik Indonesia.

Selain itu, Desy Ratnasari juga aktif dalam dunia penyiaran sebagai pembawa acara dan juri berbagai kompetisi televisi.

Pada tahun 2012 hingga 2015, Desy pernah menjadi dosen honorer di Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta.

Dengan latar belakang yang beragam dan pengalaman yang luas di berbagai bidang, Desy Ratnasari siap menghadapi tantangan dalam Pilgub Jabar 2024 dengan harapan membawa perubahan positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Ia bergabung dengan PAN di tahun 2014, kemudian mengikuti pemilihan umum di tahun yang sama dan terpilih sebagai anggota DPR.

Bintang film Joshua oh Joshua ini menjabat sebagai anggota DPR pada 2014-2019, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Melihat kiprahnya di dunia hiburan hingga politik, artis yang satu ini rasanya layak disebut multitalenta.

Pengamat politik Universitas Padjajaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, jika PAN mengusung Desy Ratnasari dalam kontestasi Pilgub Jabar harus mengumpulkan suara banyak di Pemilihan Legislatif.

“Karena itu akan menjadi modal bagi Desy Ratnasari untuk maju sebagai Cagub Jabar 2024,” sambungnya.

Hanya saja, jika melihat beberapa hasil survey yang pernah dilakukan, elektabilitas Desy Ratnasari masih di bawah nama-nama kandidat lain.

“Kalau dilihat dari beberapa survei itu sampai saat ini belum signifikan elektabilitas Desy Ratnasari itu apalagi kalau dihadapkan figur-figur seperti kalau Ridwan Kamil maju lagi, ada Dedi Mulyadi, masih agak berat,” jelasnya.

Bukan hanya itu, isu terkait kepemimpinan wanita juga bakal jadi persoalan yang harus dihadapi Desy Ratnasari jika betul-betul maju di Pilgub Jabar.

“Karena pemilih di Jabar itu ada segmen yang tingkat religiusnya agak tinggi dan biasanya mereka mempersoalkan kepemimpinan perempuan. Jadi itu bisa jadi problem sebetulnya,” ujarnya.

Oleh karena itu, Firman menilai peluang Desy Ratnasari untuk maju dan terpilih di Pilgub Jabar per hari ini masih terbilang cukup besar.

Firman berpendapat, menjadi wakil gubernur jadi pilihan paling realistis bagi Desy Ratnasari ketimbang maju sebagai calon gubernur.

“Bahkan kalau saya melihat yang lebih realistis itu untuk posisi wakil gubernur, jauh lebih realistis,” tegas Firman. ● IRY





“Kita tunggu perintah Pak Prabowo. Seandainya nanti diperintahkan beliau untuk bisa membangun Sumsel yang lebih baik, saya kira kita siap”

Mawardi Yahya

MAWARDI YAHYA VS HERMAN DERU

**Kemenangan Prabowo Gibran hasil hitung cepat (quick count) di Provinsi Sumsel akan mengang-
kat nama Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumsel Mawardi Yahya.**

Mantan Wagub Sumsel 2018-2023 itu bakal maju mengikuti kontestasi Pilgub Sumsel November 2024 mendatang dari Partai Gerindra.

Ibu bakal majunya Mawardi Yahya dalam Pilgub Sumsel sudah diketahui mantan Bupati Ogan Ilir tersebut.

Bahkan ia mengaku saat ini sedang menunggu instruksi Prabowo Subianto mengenai penunjukkan dirinya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Partai Gerindra.

Mawardi Yahya dikabarkan sudah mendapat restu dari Partai Gerindra.

“Kita tunggu perintah Pak Prabowo. Seandainya nanti diperintahkan beliau untuk bisa membangun Sumsel yang lebih baik, saya kira kita siap,” ujar Mawardi Yahya kepada wartawan, Rabu 14 Februari 2024.

Apabila keputusan tersebut sudah dibuat Prabowo Subianto sebagai pimpinan, maka Mawardi siap melaksanakan.

“Mau tidak mau, apalagi pimpinan kita seorang jenderal, seorang tentara, jadi kita tunggu perintah beliau,” ungkap Mawardi lagi.

Keyakinan Mawardi Yahya untuk maju Pilgub dari Partai Gerindra bukan tanpa alasan.

Kemenangan Prabowo Subianto hasil hitung cepat quick count di provinsi Sumsel yang mencapai 70 persen menjadi tolok ukurnya.

Angka pencapaian ini melebihi perolehan suara Prabowo Subianto di Sum-

sel pada Pilpres 2019 lalu, yang di angka 59,7 persen.

Hal itu bahkan bukan rahasia umum di kalangan elit politik Gerindra di Sumsel, bursa Cagub Sumsel bakal di isi oleh mantan Wakil Gubernur Sumsel.

Dinamika Politik Sumsel, digadagadag akan semkain seru dan menarik untuk dinantikan.

Hal itu juga berkaitan dengan Herman Deru, mantan Gubernur Sumsel yang juga menyatakan dirinya siap maju menjadi Sumsel 1 periode berikutnya.

Beda partai pengusung, mungkin kedua-duanya akan bersatu kembali? patut dinantikan tentang pemimpin Sumsel di masa mendatang.

Meski sudah ada pernyataan Mawardi soal restu Prabowo, namun publik Sumsel juga menantikan sepak terjang Gubernur Sumsel Herman Deru.

Genderang politik kapan akan ditabuh masih ditunggu publik, apalagi restu dari internal Gerindra di Sumsel kabarnya sudah sempat diberikan.

Gubernur Sumsel dua periode bahkan sempat digaungkan sejumlah simpatisan, apalagi Herman Deru disebut pernah sukses meng-

galahkan anak kandung Alex Nordin di periode terdahulu.

Meski unggul via quick Count, Mawardi sepertinya tidak ingin terlalu jumawa, dia bersyukur hasil hitung cepat bisa unggul.

Meski biasanya hitung cepat tidak jauh berbeda, namun dirinya tetap akan menunggu hasil penghitungan dari KPU secara resmi.

“Kita tetap berdoa supaya nanti dalam perjalanan penghitungan suara tidak ada permasalahan,” katanya.

Diketahui, pengaruh mantan Bupati Ogan Ilir, H Mawardi Yahya sangat kuat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Dewan Pembina Partai Gerindra Sumsel itu, bisa membuat kemenangan mutlak partai besutan Prabowo Subianto itu di Ogan Ilir pada Pemilu 2024 ini.

Lihat saja, hampir seluruh Dapil yang ada di Ogan Ilir dikuasai Gerindra.

Dari lima Dapil yang ada, hanya satu Dapil yakni Dapil 2 mencakup Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Selatan, Pemulutan Barat yang tidak dimenangkan Gerindra.

Berdasarkan sumber website KPU, pemilu24.kpu.go.id sampai Sabtu 17 Februari 2024, pukul 17.30, data yang masuk sekitar 49,66 persen.

Di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Gerindra meraup 41,01 persen suara.

Di Dapil 3 mencakup Kecamatan Rantau Alai, Kandis, Tanjung Raja, Rantau Panjang, Sungai Pinang), Gerindra memperoleh 20,65 persen suara.

Sedangkan untuk Dapil 4 Muara Kuang, Rambang Kuang, Lubuk Keliat,) Gerindra tetap memimpin di 21,15 persen, dan terakhir di Dapil 5, Tanjung Baru, Payaraman, Gerindra berjaya 26,22 persen.

Pemerhati Masalah Politik dan Sosial Drs H Iklim Cahya MM mengatakan, dari hasil perolehan suara sementara ini bisa dilihat partai apa saja yang akan mendapatkan kursi di DPRD Ogan Ilir. DPRD Ogan Ilir sendiri memiliki 40 kursi.

Menurut dia, Partai Golkar selama Pemilu sebelumnya, selalu menjadi pemimpin di Kabupaten Ogan Ilir.

Kala itu, masih ada nama Mawardi Yahya di Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut.

Namun, usai Mawardi Yahya hengkang dari Golkar, dan masuk ke Gerindra, partai kuning itu malah mendapat hasil jeblok.

Diperkirakan Partai Golkar Pemilu 2024 ini hanya akan memperoleh 1 atau 2 kursi saja di DPRD Ogan Ilir. Padahal sebelumnya pernah sampai 19 kursi di dewan.

Ini membuktikan, kalau Mawardi Yahya memiliki ‘magnet’ yang luar biasa.

“Setelah ia bergabung dengan Partai Gerindra, maka sejumlah kader Golkar yang loyal kepadanya langsung merapat,” kata Iklim Cahya.

Baik kader Golkar yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, namun dulu pernah aktif di Golkar, ikut dimana Mawardi Yahya berada.

Adanya Mawardi Effect membawa Partai Gerindra memenangkan kontestasi ini.

Setelah mantan Wakil Gubernur Sumsel itu bergabung ke Gerindra, maka langsung ia memasang strategi yakni merekrut para Caleg yang kuat dana.

“Baik dari sisi modal sosial, baik langsung calegnya atau faktor keluarganya,” kata Iklim.

•IRY



“Saya apresiasi kegiatan launching Gerakan Serentak ini. Mudah-mudahan bisa menjadi proyek percontohan dan diikuti provinsi lain”

Tri Tito Karnavian



SUMSEL BEDAH 8.391 RUMAH SERENTAK

Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Agus Fatoni melaunching tiga gerakan sekaligus.

Ketiga gerakan tersebut yaitu Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPSStSS).

Kegiatan ini berlangsung di Jl Pangeran Sido Ing Kenayan, Karang Anyar, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 21 Februari 2024.

Tri Tito Karnavian mengungkapkan rasa senang dan bahagianya bisa melaunching tiga Gerakan Serentak bagi masyarakat Sumsel.

Menurutnya, melalui Gerakan Serentak ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama keluarga penerima manfaat.

“Terima kasih kepada Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang yang telah memberikan perhatian,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah setempat bertanggung jawab memberikan layanan dasar bagi masyarakat, seperti rumah dan kesehatan yang harus terpenuhi.

Dengan adanya launching tiga gerakan serentak ini bertujuan membuktikan komitmen pemerintah dalam memberikan layanan dasar berupa tempat tinggal dan kesehatan.

“Pak Gubernur, saya apresiasi kegiatan launching Gerakan Serentak ini. Mudah-mudahan bisa menjadi proyek percontohan dan diikuti provinsi lain. Apresiasi juga saya sampaikan kepada semua pihak atas dukungannya hingga terselenggara kegiatan launching pada hari ini,” kata Tri Tito Karnavian.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni berterima kasih atas kunjungan kerja dari Ketua Umum PKK Pusat Tri Tito Karnavian.

Fatoni juga mengapresiasi Ketua Umum PKK Pusat Tri Tito Karnavian atas komitmen dan perhatiannya dalam pembangunan sanitasi, bedah rumah dan penanganan stunting guna penanganan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini Ibu Ketua Umum TP PKK Pusat Ibu Tri Tito Karnavian telah melaunching

Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan, Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan,” ucap Fatoni.

Menurutnya, melalui Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS) sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam rangka menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

Diharapkan dengan tersedianya rumah layak huni maka keluarga yang menempatnya akan terbebas dari penyakit dan berdampak pada pencegahan stunting.

“Launching Gerakan Serentak pada hari inilah sebagai langkah menangani kemiskinan ekstrem dan stunting,” ucap Fatoni.

Launching tiga Gerakan Serentak ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Tri Tito Karnavian kepada para penerima bantuan.

Terkait bantuan bedah rumah berupa bahan bangunan dan penyerahan kunci rumah yang telah dibedah. Sedangkan bantuan sanitasi berupa kloset dan septitank.

Kemudian bantuan penanganan stunting berupa beras, telur, kacang hijau, susu dan biskuit bagi ibu hamil, anak stunting juga calon pengantin.

Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS).

Melalui Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel mengadakan Operasi Pasar Murah yang berlangsung di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel secara serentak setiap hari Senin, Selasa dan Kamis hingga Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Agus Fatoni mengecek langsung harga bahan pokok ke pasar. Dia mengunjungi dua pasar tradisional sekaligus, yaitu Pasar Lemabang dan Pasar Sekip, Palembang, Sumatera Selatan, Senin 19 Februari 2024.

Berdasarkan hasil pantauannya di Pasar Lemabang, Fatoni mengatakan harga daging cenderung stabil namun sejumlah komoditi bahan pokok, seperti beras mengalami kenaikan.

Kabar gembiranya, beras bermerek SPHP yang disuplai Bulog tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung lebih murah dan paling diminati masyarakat.

“Bulog akan mensuplai terus beras SPHP. Masyarakat kalau mau beras yang murah dan harga yang stabil bisa beli beras SPHP,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan saat ini harga ayam cenderung stabil, yaitu Rp 34 ribu/kilogram. Selain itu, harga cabai juga mengalami kenaikan terutama jenis cabai burung.

“Pola ini berulang setiap bulan ruwah menjelang Ramadhan, ada beberapa barang yang

naik dan ketika puasa turun.

Maka kami

Pemerintah

melakukan

intervensi

memberikan

subsidi

agar harga

stabil,” ujar

Fatoni. ●IRY



Menurut Fatoni, total rumah yang akan diperbaiki 8.391 rumah dan ini masih terus akan bertambah. Ini bisa masuk rekor Muri, karena masih terus diinventarisir.

Nantinya, bantuan dana dari CSR dapat dianggarkan untuk membedah 75 rumah, kemudian dari APBD 3.666 rumah, APBN 1.345 rumah, Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota 345 rumah dan akan tetap bertambah.

Bahkan, Baznas Kabupaten/Kota nantinya akan membangun 10 rumah setiap bulannya.

Selain itu, terdapat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) senilai Rp 2 miliar per Kabupaten/Kota yang dapat digunakan membedah rumah sebanyak 100 unit.

Sedangkan, lanjut Fatoni, untuk pembangunan sanitasi layak terdapat 6.984 unit berupa bantuan kloset dan septitank.

“Sementara itu, untuk pembangunan sanitasi layak terdapat 6.984 unit berupa bantuan kloset dan septitank,” jelas Fatoni.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian, diantaranya yaitu tingkat kemiskinan yang masih sebesar 11,78%, tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,29% (penurunan tercepat di Sumatera) dan prevalensi balita stunting yang sebesar 18,6% (penurunan tertinggi nasional).

Fatoni menegaskan, dengan dilaunchingnya Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPSStSS) bertujuan guna melengkapi gerakan sebelumnya yang telah dicanangkan.

Turut hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian, Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Tyas Fatoni, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Sumsel, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan pejabat lainnya.

Juga Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel kemudian juga telah dilaunching Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel.

Sebagaimana diketahui, Fatoni baru saja melaunching secara resmi Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel (GIPISS) dan





“Tiga Gerakan Serentak ini merupakan lanjutan dari Gerakan Serentak sebelumnya yang telah dilakukan Pemprov Sumsel”

Agus Fatoni

GERAKAN SERENTAK DI SUMSEL BISA DICONTOH DAERAH LAIN

Gerakan serentak di Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat apresiasi dari Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian.

Dia mengatakan adanya program tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain.

“Kita juga berharap bahwa Sumsel dapat menjadi project percontohan bagi nasional, tapi ini salah satu yang terbaik,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumsel saat ini memiliki lima gerakan serentak.

Di antaranya, Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS), Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS), Gerakan Pengendalian Inflasi se-Sumatera Selatan (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah se-Sumatera Selatan (GPMSS).

Menurutnya, dengan sederet gerakan serentak tersebut merupakan bukti nyata upaya percepatan pembangunan guna melayani masyarakat.

“Kita mendorong percepatan pembangunan untuk melayani masyarakat, yaitu bedah rumah, sanitasi dan stunting. Karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Tri Tito Karnavian.

Tri Tito Karnavian juga mengungkapkan rasa senang dan bahagiannya bisa melaunching tiga Gerakan Serentak bagi masyarakat Sumsel.

Menurutnya, melalui Gerakan Serentak ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama keluarga penerima manfaat.

“Terima kasih kepada Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang yang telah memberikan perhatian,” ucapnya.

“Pak Gubernur, saya apresiasi kegiatan launching Gerakan Serentak ini. Mudah-mudahan bisa menjadi proyek percontohan dan diikuti provinsi lain. Apresiasi juga saya sampaikan kepada semua pihak atas dukungannya hingga terselenggara kegiatan launching pada hari ini,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni berterima kasih atas kunjungan kerja dari Ketua Umum PKK Pusat Tri Tito Karnavian.

Fatoni juga mengapresiasi Ketua Umum PKK Pusat Tri Tito Karnavian atas komitmen dan perhatiannya dalam pembangunan sanitasi, bedah rumah dan penanganan stunting guna penanganan kemiskinan ekstrem.

“Hari ini Ibu Ketua Umum TP PKK Pusat Ibu Tri Tito Karnavian telah melaunching Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak



se-Sumatera Selatan, Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan, Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan,” ucap Fatoni.

Menurutnya, melalui Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS) sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam rangka menangani kemiskinan

ekstrem dan stunting.

“Diharapkan dengan tersedianya rumah layak huni maka keluarga yang menempatinnya akan terbebas dari penyakit dan berdampak pada pencegahan stunting,” jelasnya.

Launching tiga Gerakan Serentak ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Tri Tito Karnavian kepada para penerima bantuan.

Terkait bantuan bedah rumah berupa bahan bangunan dan penyerahan kunci rumah yang telah dibedah.

Sedangkan bantuan sanitasi berupa kloset dan septitank. Kemudian bantuan penanganan stunting berupa beras, telur, kacang hijau, susu dan biskuit bagi ibu hamil, anak stunting juga calon pengantin.

Agus Fatoni menegaskan, dengan dilaunchingnya Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS)

bertujuan guna melengkapi gerakan sebelumnya yang telah dicanangkan.

Di antaranya, yaitu Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel kemudian juga telah dilaunching Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel.

Sebagaimana diketahui, Fatoni baru saja melaunching secara resmi Gerakan Penanganan Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah

Serentak se-Sumsel (GPMSS).

Melalui Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel mengadakan Operasi Pasar Murah yang berlangsung di 17 Kabupaten/Kota se-



Sumsel secara serentak setiap hari Senin, Selasa dan Kamis hingga Idul Fitri mendatang.

Tidak hanya louncing program serentak, Tri Tito mengawali kunjungan kerja ke Griya Agung, Palembang, Sumsel.

Di sana, Tri Tito Karnavian membuka kegiatan sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Layanan Administrasi Penduduk (Adminduk) KTP Pertama bagi WNI berusia 17 tahun.

Dalam materinya, dia mengatakan kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan di daerah-daerah lain se-Sumatera Selatan.

“Mudah-mudahan kegiatan tidak hanya dilakukan di satu tempat ini saja (Palembang) tapi juga dapat dilakukan di Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Masih dalam rangkaian kunkernya di Sumsel, Ketum TP PKK Sumsel Tri Tito Karnavian bersama rombongan termasuk Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni mengunjungi museum Al-Quran Al Akbar di Gandus. Dia mengungkapkan rasa senang dan bahagiannya dapat kembali ke Palembang.

Sementara itu Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerjanya ke Sumsel.

Dia berharap arahan dari Ketum TP PKK Pusat atas komitmennya melakukan pembangunan sanitasi dan bedah rumah juga penanganan stunting guna penanganan kemiskinan ekstrem dengan launching GBRSS, GPSSS dan GPStSS dapat dijalankan sebaik mungkin.

“Tiga Gerakan Serentak ini merupakan lanjutan dari Gerakan Serentak sebelumnya yang telah dilakukan Pemprov Sumsel, yaitu Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel,” kata Fatoni.

Turut dalam rombongan Ketum PKK selama di Palembang Kelompok Kerja (Pokja) I dan Pokja IV TP PKK Pusat. Selain itu hadir serta Pj Walikota Palembang Ratu Dewa, Forkopimda Sumsel, Ketua TP PKK se-Sumsel, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel dan para kader PKK Sumsel lainnya. •IRY



Fadli Zon

KOMENG "KING OF CALEG"

Komedian Alfiansyah Bustami atau yang akrab dikenal dengan nama panggung Komeng, membuat viral dengan pencalonan dirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat (Jabar) pada Pemilu 2024 dengan menampilkan foto unik.

Tidak hanya itu Komeng juga diketahui tiak melakukan kampanye besar-besaran dan "minim Modal".

Komeng membuktikan bahwa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak selalu dengan identik mahal. Bahkan, komedia senior ini tidak diusung partai politik.

Komeng justru mendapatkan suara terbanyak diantara jajaran artis lainnya. Bahkan, berdasarkan data perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komeng berhasil mendulang suara sebanyak 1,9 juta suara per Kamis 22 Februari 2024.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Partai Gerindra Fadli Zon memberikan tanggapan terhadap perolehan suara yang diraih Komeng.

Mengutip unggahan video podcast di media X @fadlizon memberikan ucapan selamat pada sang komedian. Fadli Zon juga memberikan julukan Komeng sebagai "King of Caleg"

Fadli Zon dan Komeng sendiri diketahui telah melakukan pertemuan sekaligus makan bersama pada Minggu 18 Februari 2024.

Dalam rekaman pertemuan tersebut, Fadli Zon memberikan ucapan selamat kepada Komeng atas kemenangan suara yang diraih dalam Pemilu 2024 menjadi DPD-RI.

"Komeng, King of Caleg tanpa kampanye," tulisnya.

Pada video tersebut, Fadli Zon bertanya langsung kepada Komeng atas keberhasilannya memperoleh suara terbanyak tanpa kampanye.

"Kok bias ya, Komeng suaranya melejit kayak gitu, Komeng gak pakai serangan fajar?," tanya Fadli Zon.

"Gak pakai daleman kali pak yang melejit biasanya, serangan fajar gak mungkin la pak kalau serangan jantung mungkin kali pak," jawab Komeng.

Selain Fadli Zon, orang yang juga mengagumi Komeng adalah Deddy Corbuzier. Menurut ayah Azka, sang komedian beraksi dengan otaknya ketimbang otot.

Mendengar pernyataan Deddy Corbuzier, rupanya Komeng menyebut bahwa aksinya itu terinspirasi dari kata-kata yang pernah disampaikan sang mantan pesulap.

"Kan Bapak bilang kalau bikin gerakan

jangan orang tau," ucap Komeng, mengutip kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa 21 Februari 2024.

Tak hanya itu. Di samping faktor foto nyeleneh, Komeng juga membeberkan bahwa selama masa kampanye, dirinya tak melakukan kegiatan tersebut. Namun begitu, ada satu hal yang menjadi faktor penentu lain hingga dirinya bisa dipilih oleh warga Jawa Barat.

Rupanya selama masa kampanye, Komeng lebih memilih untuk mengambil pekerjaan di area Jawa Barat. Menurut Deddy, cara Komeng tersebut secara tak langsung sama seperti kegiatan kampanye.

"Enggak, ngapain (kam-pa-nye).



Saya mah malah nyari job tapi, saya ambil lebih banyak di Jawa Barat," ungkap Komeng.

"Kampanye tapi malah dapat duit. Kampanyenya tidak terlihat kampanye," sahut Deddy Corbuzier.

Lebih lanjut, Komeng membeberkan bahwa selama menerima pekerjaan melawak di Jawa Barat, ia hanya memohon doa restu kepada para penontonnya untuk menjadi caleg.

"Saya kalau ngomong cuma mohon doa restu, karena kan ada Panwaslu. Saya bilang saya enggak kampanye. Saya hanya mohon doa restu, 'Nih saya nyaleg nih.' Saya enggak nyuruh (nyoblos) lho," ungkap Komeng.

"Panwaslu, panitia pengawas lucu, karena saya kan dari komedi, Pak," seloroh Komeng.

Bagi Komeng, dia tidak memiliki ambisi apapun selain memperjuangkan Hari Komed. Jika terpilih bersyukur, jika tidak juga tetap bersyukur.

Ketulusan itulah yang mungkin menggugah masyarakat untuk memilih Komeng.

Meskipun tidak ada strategi politik yang dilakukan, Komeng telah menjadi politisi yang mampu menggunakan berbagai cara meraup suara.

Padahal pengambilan foto dilakukan secara spontan karena permintaan dari KPU.

Secara simbolik foto nyeleneh Komeng memberikan gambaran kepada politisi bahwa dunia politik tidak melulu tentang glamoritas.

Dosen di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula, Dens Saputra mengungkapkan, kesederhanaan bisa ditunjukkan meskipun tanpa perlu mel-

akukan kampanye. Justru spontanitas menjadi kunci dalam perebutan suara publik.

Komeng adalah bukti dari sisi lain dunia politik Tanah Air. Normalitas perlahan akan ditinggali oleh masyarakat. Sehingga sesuatu yang baru dan "nyeleneh" bisa menjadi peluru untuk memenangkan kompetisi elektoral.

"Komeng menunjukkan bahwa menjadi politisi tidak melulu soal glamoritas. Kesederhanaan bisa menjadi pemikat jitu dalam menarik simpati rakyat," ungkapnya.

Ini merupakan fenomena unik dalam perhelatan politik Tanah Air. Tidak ada transaksi politik uang, tidak ada kongkalikong kekuasaan, bahkan tidak ada beban ketika tidak dipilih rakyat.

Dari perspektif Komeng bisa dilihat bahwa politisi konvensional hari ini cukup lucu. Menggunakan jalan pintas untuk dapat kekuasaan. Komeng melakukan sebaliknya tanpa ada pendekatan politik praktis untuk menang kompetisi.

"Politik tidak selalu saling senggol atau saling curiga seperti anggapan banyak orang. Menjadi anggota dewan bisa gratis hanya bermodal foto unik," jelasnya.

Keterlibatan menjadi seorang legislatif dengan tujuan mewujudkan hari komedi merupakan tujuan mulia. Setiap politisi selalu memiliki kepentingan apapun bentuknya. Komeng datang dengan "tas kosong".

Tampah beban utang, beban konspirasi, bahkan beban melayani penguasa. Tidak bisa ditutup kemungkinan bahwa parlemen lebih menarik karena dewa komedi sudah di sana.

Kebijakan tidak lagi soal kepentingan untuk memenuhi kantong pribadi. Namun berubah menjadi hal baik. Apalagi nuansa komedi di taruh dalam setiap proses pembuatan keputusan.

"Sepertinya, negara ini butuh komedian untuk bisa menyampaikan kritik kritis dengan cara sarkasme. Siapa sangka tas kosong yang dibawa oleh Komeng berdampak besar bagi perolehan suaranya," bebarnya. ●IRY





“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,”

Hadi Tjahjanto

PESAN PENTING JOKOWI PADA HADI TJAHJANTO

Gantikan Mahfud MD, Hadi Tjahjanto resmi dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Istana Negara, Rabu 21 Februari 2024

Hadi sebelumnya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hadi menggantikan posisi Mahfud MD karena mengundurkan diri setelah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Calon Presiden (Capres) RI Ganjar Pranowo dengan nomor urut 03.

Jokowi melantik dua menteri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Setelah Keppres dibacakan, Presiden Jokowi memimpin langsung pembacaan sumpah jabatan yang diikuti Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga dilantik sebagai Menteri ATR/BPN.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh mantan Panglima TNI tersebut.

Tercatat, ada sejumlah pejabat dan menteri yang hadir dalam pelantikan, mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2019-2024 Wiranto.

Kemudian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Plt Menko Polhukam sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Wakil



Presiden Ma'ruf Amin.

Setelah melantik Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi mengungkapkan pesan penting sebagai Menko Polhukam yang baru berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.

“Sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban,” kata Jokowi.

Bukan hanya soal keamanan dan ketertiban, orang nomor satu di Indonesia ini berpesan hal lain pada mantan Panglima TNI tersebut. Termasuk soal dukungan terhadap investasi yang hendak masuk ke tanah air.

“Juga berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang masuk di Indonesia,” tambahnya.

Hadi merupakan pria kelahiran Malang, Jawa Timur 8 November 1963.

Hadi merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara berpangkat Marsekal. Ia adalah putra pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bambang Sudarto dan Nur Sa'adah.

Suami Nanik Istumawati itu menyelesaikan pendidikan S1 pada 1997, dan melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di jurusan Manajemen Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma pada 2017.

Di pendidikan militer, Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan militer di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara pada 1995, Sekolah In-

struktur Penerbangan 1999, College Interarmes De Defence (Sesko Perancis) pada 2001, Sekolah Staf dan Komando TNI 2009, serta PPSA Lemhannas 2015.

Ayah dari dua orang anak yang bernama Hanica Rellinga Dara Ayu dan Lettu Pb Handika Relangga Bima Yogatama itu mengawali karirnya di dunia militer sebagai perwira penerbang Skadron 04 Land Abdurahman Saleh.

Kemudian, dia berhasil menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) pada 2013 hingga 2015, dilanjutkan dengan mengisi jabatan Komandan Landasan Udara (Danlanud) Abdurachman Saleh selama 2015.

Hadi juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden pada 2015 hingga 2016.

Setelah itu ia menduduki posisi Irgen Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepanjang 2016. Lalu menjabat sebagai Panglima TNI selama 2017, ia merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari Angkatan Udara setelah Djoko Suyanto.

Setelah itu, Presiden Jokowi melantik Hadi sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu, 15 Juni 2022, ia menggantikan posisi Sofyan Djalil.

Tugas Kemenko Polhukam

Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Tugas Kemenko Polhukam ini dilak-

sanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenko Polhukam menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. •IRY



Lolly Suhenty

780 TPS PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan rekomendasi terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

Selain itu, sebanyak 132 TPS direkomendasikan melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL), serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS). Sehingga, Bawaslu secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

“Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024,” kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Lolly menjelaskan, rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan

(DPTb) Pemilu 2024.

“Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali,” jelasnya.

Sementara itu, Lolly mengatakan, alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan, rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan kea-

manan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah 24 Februari 2024. Hingga 21 Februari 2024, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS. Batas waktu pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.

Provinsi yang paling banyak diberikan rekomendasi PSU oleh Bawaslu yaitu Papua Tengah dengan 94 rekomendasi, berikutnya Sulawesi Selatan (62), Nusa Tenggara Barat (53), Maluku (50), Nusa Tenggara Timur (50), Jawa Timur (37), Aceh (35), Sulawesi Tengah (32), Jawa Tengah (28), Sumatera Utara (24).

Kemudian, Papua (24), Papua Barat (23), Sumatera Selatan (22), Sulawesi Tenggara (20), Kalimantan Timur (18), Maluku Utara (18), Sumatera Barat (17), Riau (17), Jawa Barat (16), Kalimantan Tengah (15), Yogyakarta (15), Gorontalo (11), Kepulauan Riau (10), dan Kalimantan Barat (10).

Lalu, Jambi (9), Kalimantan Utara (9), Papua Barat Daya (9), Sulawesi Barat (8), Papua Tengah

(7), Lampung (6), Bengkulu (5), Banten (5), Bali (5), Papua Selatan (5), Sulawesi Utara (4), Bangka Belitung (2), Kalimantan Selatan (1), dan DKI Jakarta (1).

Sebelumnya, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan sebanyak 2.413 TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang lantaran para pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kendati demikian, Bawaslu masih mendalami hal tersebut. Dia mengatakan apakah hal itu benar merupakan rekomendasi dari panwascam dan bawaslu kabupaten/kota atau tidak.

“Tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian (ada potensi PSU) dari panwascam dan juga bawaslu kabupaten/kota,” kata Bagja di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.

Sebelumnya, Bawaslu juga merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing TPS yang terdampak bencana banjir. Rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

“Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

“Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama,” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan. Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

Di sisi lain, Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

“Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara,” kata Bagja.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah. ●RDO





“Sekarang kalau melihat berbagai masalah di KPU, utamanya soal Sirekap ini sangat wajar bila gerakan-gerakan tersebut muncul kembali untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia”

Roy Suryo

INFO
KPU

23

Minggu III • Februari 2024

AUDIT DIGITAL FORENSIK SIREKAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk melakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu yang mendorong hal itu adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP).

PDIP mengirimkan Surat Pernyataan Penolakan yang ditandatangani Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto kepada KPU di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

“PDIP Perjuangan juga mendesak dilakukan audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” bunyi surat pernyataan tersebut.

Desakan itu sehubungan dengan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Oleh karena itu, PDIP meminta KPU membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Anggota KPU, Idham Holik, menyampaikan bahwa KPU telah menerima surat PDIP mengenai audit forensik digital atas penggunaan Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Semalam KPU telah menerima surat tersebut dalam format pdf yang disampaikan lewat messenger WhatsApp yang dikirim oleh narahubung DPP PDIP Perjuangan kepada KPU,” kata Idham.

Menurutnya, surat dari partai banteng moncong putih itu akan dibahas dalam forum rapat pleno pimpinan. “Semua surat yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu akan dibahas dalam forum rapat pleno pimpinan,” jelasnya.

Dorongan agar KPU melakukan audit digital forensik juga disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD.

“Beberapa hari lalu, si Idham Holik dari KPU sudah mengatakan siap diaudit, nah ayo dong, lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang,” kata Mahfud di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa, 20 Februari 2024.

Menurut Mahfud, jika lembaga yang mengaudit Sirekap bukan berasal dari lembaga i n d e -

penden, maka akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

“Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan selama ini. Lembaga independen, kemudian lembaga-lembaga yang memang bekerja di bidang IT itu kan banyak yang menawarkan diri. Karena semuanya menemukan kesalahan. Kalau memang mau jujur ya audit sekarang. Itu bener enggak,” ucap Mahfud.

Oleh sebab itu, dia kembali mendorong agar lembaga yang mengaudit Sirekap berasal dari lembaga independen, bukan lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Oleh sebab itu, perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap, dan sistem data server KPU-nya sekalian,” imbuh Mahfud.

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menuturkan, audit forensik oleh lembaga independen terhadap Sirekap sudah dilakukan sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa audit terhadap teknologi informasi komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi komunikasi pemerintah atau lembaga terakreditasi sesuai ketentuan berlaku.

Ketika ditanya lembaga apa yang melakukan audit terhadap Sirekap, Betty tak mau menyebutkannya. “Anda silakan baca, kami sudah melakukan itu, nanti silakan

dikoordinasikan,” ujar koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI itu.

Betty enggan merespons panjang lebar ketika ditegaskan bahwa Mahfud ingin audit dilakukan oleh lembaga independen. “Kami sesuai dengan SPBE Perpres yang sudah dilakukan,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, pada Minggu, 18 Februari 2024, KPU memerintahkan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kemudian, dijadwalkan ulang menjadi Selasa, 20 Februari 2024.

Di sisi lain, PDIP menilai Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK adalah dua hal yang berbeda. Sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.

PDIP juga menyampaikan permasalahan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegas PDIP perjuangan dalam surat pernyataannya.

Selain itu, PDIP juga menolak sikap/keputusan KPU yang meniadakan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK. Partai banteng menilai ihwal tersebut dapat membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pemerhati Telematika, AI, OCB & Multimedia Independen, Roy Suryo, menyebut, IT KPU harus diperiksa untuk dilakukan audit forensik. Ini dilakukan untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia.

“Jadi kalau kemarin sudah muncul gerakan moral dari ratusan profesor, doktor, master, mahasiswa hingga masyarakat di seluruh perburi negeri ini. Sekarang kalau melihat berbagai masalah di KPU, utamanya soal Sirekap ini sangat wajar bila gerakan-gerakan tersebut muncul kembali untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia,” kata Roy Suryo, Selasa, 20 Februari 2024.

Roy mengatakan, jangan sampai gerakan-gerakan tersebut berhenti hanya sampai sesaat sebelum Hari-H Pemilu pada 14 Februari 2024, alias harus tetap digelorkan sampai Indonesia benar-benar mendapatkan pimpinan terbaik sesuai cita-cita reformasi selama ini. Salah satu gerakan moral yang masih terus semangat menyuarakan hal ini adalah “Gerakan Pemilu Bersih” yang melibatkan 100 tokoh nasional untuk menolak Pemilu curang, ditambah oleh “Trial dan Error”-nya Sirekap ini.

Roy Suryo juga mempertanyakan, bila gerakan-gerakan moral tersebut terus aktif, apakah hal tersebut cukup untuk bisa meluruskan kembali arah reformasi di Indonesia?

“Tentu tidak, jika rakyat Indonesia masih belum sadar bahwa apa yang terjadi saat ini makin mengancam demokrasi di Indonesia,” tutup Roy..●RDO



“Setidaknya saya kira sampai saat pemilu dilakukan, Jokowi tidak punya peran yang sangat signifikan untuk mendongkrak elektabilitas PSI, meskipun berbagai upaya mungkin sudah mereka lakukan”

Deni Irvani



HANYA 9 PARPOL LOLOS SENAYAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperbarui data real count atau hitung suara Pileg 2024. Ada 18 partai politik yang mengikuti Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil real count KPU Pileg 2024 yang dirilis di situs pemilu2024.kpu.go.id hingga 21 Februari 2024 pukul 23.00 WIB, total suara yang masuk sebanyak 60,89 persen. Data diambil dari 501.268 dari 823.236 TPS.

Hasilnya, sembilan partai politik lolos ke Senayan dan melampaui ambang batas atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Sembilan partai lainnya meraih parliamentary threshold di bawah 4 persen dan terancam gagal ke Senayan.

Dari data tersebut, PDIP masih menjadi partai yang meraih peringkat tertinggi di Pileg 2024 dengan total suara 16,91 persen. Sementara Partai Golkar mendapat 15,11 persen, disusul Partai Gerindra 13,45 persen, dan PKB 11,86 persen.

Adapun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diketuai putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sementara ini belum bisa melampaui ambang batas parlemen. Perolehan suara PSI sejauh ini hanya 2,51 persen. Di bawah PSI, Partai Perindo meraih suara mencapai 1,28 persen. Sedangkan, Partai Kebangkitan Nusantara menjadi yang paling sedikit mendapatkan suara yakni 0,23 persen.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut efek yang ditimbulkan dari pemilih yang merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo tidak berpengaruh signifikan untuk mendongkrak elektabilitas PSI.

“Setidaknya saya kira sampai saat pemilu dilakukan, Jokowi tidak punya peran yang sangat signifikan untuk mendongkrak elektabilitas PSI, meskipun berbagai upaya mungkin sudah mereka lakukan,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, saat memaparkan temuan quick count dan exit poll SMRC yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Berdasarkan hasil exit poll SMRC, kata Deni, terdapat 80 persen pemilih yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Angka itu terdiri atas 31 persen yang sangat puas dan 49 persen lainnya cukup puas.

“15 persen (pemilih) kurang puas, tidak puas sama sekali 3 persen, dan ada 2 persen yang tidak tahu,” sambung dia.

Dari 80 persen pemilih yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi tersebut, mayoritasnya lebih memilih



PDIP pada Pemilu 2024, yakni mencapai angka 19 persen. Disusul oleh Partai Golkar dan Gerindra yang sama-sama 15 persen.

“Kemudian, ada PKB 10 persen. Kita lihat ada NasDem sama dengan Demokrat 8 persen, lalu PAN 7 persen, PPP 4 persen,” papar Deni.

Sementara itu, hanya ada 3 persen dari total pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi yang memilih PSI. Menurut SMRC, data tersebut menunjukkan bahwa upaya PSI untuk mengidentifikasi partainya dengan Jokowi belum berhasil menarik basis massa Jokowi.

“PSI mungkin yang tadi disebut sebagai partainya Presiden Jokowi, dikampanyekan sebagai partai Jokowi, bahkan dipimpin oleh anak Jokowi; identifikasi dengan Jokowi itu kita lihat ternyata belum berhasil kalau ternyata hanya 3 persen dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi yang bisa ditarik oleh PSI,” tutur Deni.

Sejatinya, upaya menggaet massa Jokowi tidak hanya dilakukan oleh PSI. SMRC mencatat, partai-partai yang berada di Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, juga melakukan hal yang sama.

“Kita lihat partai-partai lain juga berusaha mendapatkan efek dari positifnya citra pemerintahan Jokowi. Gerindra, misalnya, kita lihat elite politiknya itu memposisikan diri sebagai partai yang sangat pro Jokowi. Partai Golkar juga demikian, kemudian PAN,” imbuh Deni.

Di sisi lain, DPP PDIP mengirimkan surat pernyataan penolakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat yang ditandatangani Sekjen PDIP Hasdo Kristiyanto dan Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto pada 20 Februari 2024 itu berisi 6 poin.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah

pun membenarkan surat tersebut. “(Ya, itu kan ada stempel dan tanda-tangan Pengurus DPP nya,” kata dia.

Pada awal surat, dituliskan bahwa adanya permasalahan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional, kemudian diikuti pada 18 Februari 2024

| Berikut data real count sementara KPU per 21 Februari 2024 pukul 23.00 WIB: | |
|---|----------------|
| 1. PDIP | : 16,91 persen |
| 2. Partai Golkar | : 15,12 persen |
| 3. Partai Gerindra | : 13,44 persen |
| 4. PKB | : 11,82 persen |
| 5. Partai Nasdem | : 9,4 persen |
| 6. PKS | : 7,48 persen |
| 7. Partai Demokrat | : 7,41 persen |
| 8. PAN | : 6,93 persen |
| 9. PPP | : 4,05 persen |
| 10. PSI | : 2,54 persen |
| 11. Partai Perindo | : 1,28 persen |
| 12. Partai Gelora | : 0,93 persen |
| 13. Partai Hanura | : 0,75 persen |
| 14. Partai Buruh | : 0,61 persen |
| 15. Partai Ummat | : 0,44 persen |
| 16. PBB | : 0,35 persen |
| 17. Partai Garuda | : 0,32 persen |
| 18. PKN | : 0,23 persen |

KPU memerintahkan kepada seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dijadwalkan ulang menjadi 20 Februari 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, PDIP menyampaikan Surat Pernyataan Penolakan yang berisi enam hal.

Pertama, kegagalan Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK adalah dua

hal yang berbeda, sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.

Dua, KPU tidak perlu melakukan penundaan tahapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkat PPK karena tidak terdapat situasi kegentingan yang memaksa/tidak terdapat kondisi darurat.

Ketiga, permasalahan kegagalan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara/C. Hasil sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak suara ditutup dan disegel kembali.

Keempat, PDIP secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno.

Lima, menolak sikap/keputusan KPU yang menunda tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat pleno PPK karena telah membuka celah kecurangan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, serta melanggar asas kepastian hukum, efektifitas-efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Keenam, PDIP meminta audit forensik digital atas penggunaan alat bantu Sirekap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, kemudian membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat/publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. RDO